

**OPTIMALISASI PROSES PENAGIHAN PPh 23 JASA UNTUK
MENDUKUNG KELANCARAN PELAPORAN KEUANGAN DI PT.
THREEBOND GARPAN SALES INDONESIA**

Tugas Akhir Magang



NAKHA JURNAL ACC

15 MEI 2025

Di Susun Oleh

Nama	: Alina Jasmine
Nomor Mahasiswa	: 21311561
Program Studi	: Manajemen
Dosen Pembimbing	: Prof. Dr. Drs. Sutrisno, M.M
Supervisor	: Farmila

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PROGRAM SARJANA
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2025

**OPTIMALISASI PROSES PENAGIHAN PPh 23 JASA UNTUK
MENDUKUNG KELANCARAN PELAPORAN KEUANGAN DI PT.
THREEBOND GARPAN SALES INDONESIA**

Tugas Akhir Magang

Disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana
Strata-1 di Program. Studi Manajemen Program Sarjana Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Universitas Islam Indonesia

Disusun Oleh:

Nama: Alina Jasmine

NIM: 21311561

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PROGRAM SARJANA
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2025**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini menyatakan bahwa dalam tugas akhir magang ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai ketentuan yang berlaku”

Yogyakarta, 18 Mei 2025

Penulis



Alina Jasmine

21311561

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

Optimalisasi proses penagihan PPh 23 jasa untuk mendukung kelancaran pelaporan keuangan
di PT. ThreeBond Garpan Sales Indonesia

Diajukan Oleh:

Nama : Alina Jasmine
Nomor Mahasiswa : 21311561
Program Studi : Manajemen S1
Bidang Konsentrasi : Keuangan

Yogyakarta, 2025

Telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing

NAKHA JURNAL ACC
15 MEI 2025



Prof. Dr. Drs. Sutrisno, M.M



BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

NO.: 3428/DEK/10/Prodi.Mj/III/2025

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada Semester Ganjil 2023/2024, Rabu 04 Juni 2025, Program Studi Manajemen Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII telah menyelenggarakan Ujian Tugas Akhir yang disusun oleh:

Nama : Alina Jasmine
No. Mahasiswa : 21311561
Judul Tugas Akhir : Optimalisasi proses penagihan PPh 23 jasa untuk mendukung kelancaran pelaporan keuangan di PT ThreeBond Garpan Sales Indonesia
Pembimbing : Sutrisno, Prof., Dr., Drs., M.M.

Berdasarkan hasil evaluasi Tim Dosen Penguji Tugas Akhir, maka Tugas Akhir tersebut dinyatakan:

Lulus Ujian Tugas Akhir

Nilai : B+
Referensi : Layak ditampilkan di Perpustakaan

Tim Penguji :

Ketua Tim : Abdur Rafik, S.E., M.Sc.
Anggota Tim : Sutrisno, Prof., Dr., Drs., M.M.

Yogyakarta, 04 Juni 2025

Ketua Program Studi Manajemen,



Abdur Rafik, SE., M.Sc.

NIK. 133110105

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR

TUGAS AKHIR BERJUDUL

OPTIMALISASI PROSES PENAGIHAN PPH 23 JASA UNTUK MENDUKUNG KELANCARAN PELAPORAN KEUANGAN DI PT THREEBOND GARPAN SALES INDONESIA

Disusun oleh : Alina Jasmine

Nomor Mahasiswa : 21311561

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan lulus
hari ini, tanggal: Rabu 04 Juni 2025

Pembimbing TA	: Sutrisno, Prof., Dr., Drs., M.M.
Penguji	: Abdur Rafik, S.E., M.Sc.

Mengetahui

Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia



Prof. Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D.

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR

HALAMAN MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(QS. Al-Baqarah : 286)

“Bukan kesulitan yang membuat kita takut, tapi ketakutan yang membuat kita sulit”

(Ali bin Abi Thalib)

“Proses orang beda-beda, jalan mereka juga beda, finish mereka juga beda, jadi jangan di samakan dengan mereka yang sudah sampai duluan”

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil ‘alamin, atas rahmat dan hidayah dari Allah swt. sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan magang yang berjudul “Optimalisasi proses penagihan PPh 23 jasa untuk mendukung kelancaran pelaporan keuangan di PT. ThreeBond Garpan Sales Indonesia” yang disusun untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Manajemen Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari bahwa laporan magang mungkin tidak akan terselesaikan tanpa adanya dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah swt. karena Rahmat dan hidayah nya, serta anugrah kemampuan berpikir kepada penulis, sehingga laporan magang ini dapat terselesaikan.
2. Bapak Prof. Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika (FBE) Universitas Islam Indonesia.
3. Prof. Dr. Drs. Sutrisno, M.M. selaku dosen pembimbing saya, yang telah meluangkan waktunya, memberikan saran dan membimbing penulis dalam menyelesaikan laporan magang ini.
4. Kepada Papa (Junedi) dan Mama (Tri Widyastuti) yang selalu ada untuk penulis, memberikan doa dan perhatian untuk penulis.
5. Kepada seluruh keluarga besar penulis yang selalu mendoakan keberhasilan penulis, yang tidak bisa disebut satu persatu.
6. Kepada seluruh jajaran staf Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
7. Kepada seluruh jajaran direksi dan karyawan PT Threebond Garpan Sales Indonesia yang telah mengizinkan penulis magang dan selalu membantu pada saat magang.
8. Shela Nur Fatimah selaku sahabat penulis yang senantiasa menemani penulis dalam keadaan sulit dan senang, memberikan dukungan serta motivasi.
9. Indah selaku teman sejak masa maba, terima kasih atas kebersamaan dan dukungan yang tak pernah putus selama masa perkuliahan hingga penyusunan Tugas Akhir ini.
10. Resti teman KKN yang masih berlanjut main sampai selesai KKN, dan sudah mendukung penulis dalam menyelesaikan tugas akhir.

11. Ka desy, Laila, Karin, Sintia, Tiffani, Selaku teman yang sudah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir.
12. Teman-teman penulis yang lainya yang telah membantu selama perkuliahan.
13. Dan yang terakhir. Kepada diri saya sendiri, Alina Jasmine. Terima Kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima Kasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai di titik ini, walaupun sering kali putus asa apa yang diusahakan dan belum berhasil. Namun terima kasih tetap menjadi manusia yang ingin berusaha menyelesaikan apa yang sudah di mulai. Terima Kasih sudah bertahan.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan Magang.....	i
Halaman Judul Magang	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	iii
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	iv
BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 PROFIL PERUSAHAAN	1
1.2 LATAR BELAKANG	2
1.3 RUMUSAN MASALAH	7
1.4 TUJUAN PENELITIAN	7
1.5 MANFAAT PENELITIAN	7
BAB II KAJIAN TEORI.....	9
2.1 LANDASAN TEORI.....	9
2.2 HASIL KAJIAN TERDAHULU	13
BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN.....	15
3.1 Pendekatan Penelitian	15
3.2 Data dan Sumber Data	16
3.3 Metode Pengumpulan Data	17
3.4 Variabel Penelitian	19
3.5 Alat Analisis	20
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	23
4.1 Hasil.....	23
4.2 Pembahasan.....	30
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	36
5.1 Kesimpulan.....	36
5.2 Saran	36
DAFTAR PUSTAKA	37
LAMPIRAN.....	40
Lampiran 1. Surat Permohonan Magang	40

Lampiran 2. Surat Penerimaan Magang.....	41
Lampiran 3. Daftar Hadir Magang	42

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Ringkasan Invoice dan Komponen Pajak	24
Tabel 4. 2 Ringkasan Faktur Pajak Berdasarkan Transaksi.....	25
Tabel 4. 3 Ringkasan Bukti Pembayaran Transaksi	27
Tabel 4. 4 Ringkasan Pajak dan Pemotongan PPh 23	28
Tabel 4. 5 Ringkasan Tabel perbandingan nilai utama antar dokumen.....	30

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan proses penagihan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 di PT. ThreeBond Garpan Sales Indonesia, dengan harapan dapat mendukung kelancaran pelaporan keuangan perusahaan. PPh 23 merupakan elemen krusial dalam sistem perpajakan Indonesia, yang dikenakan atas penghasilan dari jasa, sewa, dan sumber pendapatan lainnya. Ketidakefisienan dalam proses penagihan dapat berakibat pada keterlambatan pelaporan dan risiko sanksi dari otoritas pajak, yang pada gilirannya dapat merugikan reputasi dan kinerja finansial perusahaan. Metode penelitian yang diterapkan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis dokumen, mencakup studi terhadap berbagai bukti transaksi, invoice, faktur pajak, dan dokumen pemotongan PPh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi terintegrasi berbasis ERP Callisto telah signifikan meningkatkan akurasi dan efisiensi pengelolaan PPh 23. Tingkat kesalahan menurun dari 3,2% menjadi 0,4%, dan proses pengunggahan bukti potong menjadi lebih cepat. Di samping itu, mekanisme pengendalian internal yang diterapkan seperti sistem validasi NPWP dan pelatihan rutin bagi karyawan telah terbukti efektif dalam meningkatkan kepatuhan terhadap perpajakan. Penelitian ini juga menemukan bahwa pemanfaatan teknologi informasi, seperti e-Bupot unifikasi, berperan penting dalam menambah transparansi dan akuntabilitas pelaporan pajak. Dengan demikian, optimalisasi proses penagihan PPh 23 di PT. ThreeBond Garpan Sales Indonesia tidak hanya memenuhi kewajiban perpajakan, tetapi juga berkontribusi positif terhadap citra perusahaan di mata para pemangku kepentingan.

Kata kunci: PPh 23, penagihan pajak, sistem informasi akuntansi, kepatuhan perpajakan, PT. ThreeBond Garpan Sales Indonesia.

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 PROFIL PERUSAHAAN

PT Threebond Garpan Sales Indonesia (TBGI) adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan bahan kimia dan sealant. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan, TBGI memiliki banyak transaksi jual beli dengan pemasok dan pelanggan. PT ThreeBond Garpan Sales Indonesia, memiliki posisi yang kuat dalam industri perekat dan bahan kimia khusus di Indonesia. Dengan berfokus pada inovasi teknologi, kualitas produk dan layanan pelanggan yang prima, perusahaan telah membangun reputasi yang baik dan menjadi mitra terpercaya di berbagai industri. PT ThreeBond Garpan Sales Indonesia terkenal dengan produknya yang memenuhi standar industri dan mampu memenuhi kebutuhan berbagai pelanggan. Didukung oleh manajer berpengalaman dan tim karyawan berbakat, perusahaan terus tumbuh dan berkembang dengan tetap menjaga tanggung jawab lingkungan dan sosial. Dengan jaringan penjualan domestik dan internasional yang komprehensif, PT ThreeBond Garpan Sales Indonesia siap menghadapi tantangan di seluruh dunia dan semakin memperluas kehadirannya di pasar global. Melalui komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai inovasi, kualitas, dan keberlanjutan, perusahaan berupaya menjadi pemimpin industri dan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu, PT ThreeBond Garpan Sales Indonesia terus bergerak maju sebagai industri dengan visi masa depan yang cerah. Perusahaan mungkin telah menerima berbagai penghargaan dan sertifikasi yang mengakui komitmennya terhadap kualitas, inovasi, dan keberlanjutan. Penghargaan ini dapat mencakup pengakuan atas keunggulan dalam manajemen, inovasi produk, layanan pelanggan dan upaya pengembangan masyarakat. Keberhasilan ini tidak hanya mencerminkan kinerja perusahaan yang mencapai level tertinggi di industri, tetapi juga komitmen PT ThreeBond Garpan Sales Indonesia terhadap keunggulan dan keberlanjutan dalam mengeksplorasi pasar baru, diverifikasi produk atau ekspansi geografis. Hal ini juga memberikan kepercayaan kepada pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya terhadap produk mereka. Dan perusahaan dapat berupaya mengembangkan kemampuan teknologinya dengan memanfaatkan teknologi baru dan terus mengembangkan produk dan layanan inovatif. Pemikiran ke masa depan ini mencakup pandangan perusahaan mengenai

perannya dalam industri yang berkembang dalam kompleks serta bagaimana perusahaan berencana mengelola perubahan dan beradaptasi terhadap masa depan dan tantangan. Di masukannya pandangan ini akan memperluas profil perusahaan dan memberikan gambaran lengkap mengenai peran dan tujuan jangka panjang PT ThreeBond Garpan Sales Indonesia.

Selain itu PT Threebond Garpan Sales Indonesia memiliki 7 Motto Perusahaan

1. Utamakan Pelayanan di atas Segalanya
2. Hormati Kebijakan Perusahaan
3. Hormati kesamaan/ Kesetaraan pada setiap Orang
4. Selalu Melihat Sisi Baik di Setiap Orang
5. Memiliki Impian untuk menjadi Besar dan Maju
6. Hiduplah pada saat ini
7. Pancarkan Nilai Luhur Kehidupan Keluarga

1.2 LATAR BELAKANG

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah salah satu komponen krusial dalam sistem perpajakan di Indonesia, yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak dari jasa, sewa, dan sumber penghasilan lainnya. Bagi perusahaan, pengelolaan PPh 23 yang efektif sangat penting untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan serta kelancaran dalam pelaporan keuangan. PT. ThreeBond Garpan Sales Indonesia, yang bergerak di bidang distribusi dan penjualan, menghadapi tantangan dalam mengoptimalkan proses penagihan PPh 23 yang terkait dengan jasa yang diberikan. Proses yang tidak efisien dapat menyebabkan keterlambatan dalam pelaporan serta risiko sanksi dari otoritas pajak, yang pada akhirnya dapat berdampak negatif pada reputasi dan kinerja keuangan perusahaan.

Dalam studi yang dilakukan oleh (Hendra et al., 2014) , ditemukan bahwa penerapan akuntansi pajak penghasilan Pasal 23 yang baik dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan meminimalisasi risiko kesalahan dalam pelaporan. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian (Astaman et al., 2023) yang menekankan pentingnya pengelolaan kewajiban perpajakan yang baik untuk mengurangi tantangan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, optimalisasi proses penagihan PPh 23 di PT. ThreeBond Garpan Sales Indonesia menjadi sangat penting untuk mendukung kelancaran pelaporan keuangan.

(Ramawardhani & Yudhaningsih, 2020) juga mengungkapkan bahwa perhitungan dan pemotongan PPh 23 yang akurat sangat diperlukan untuk memastikan bahwa perusahaan tidak hanya mematuhi peraturan perpajakan, tetapi juga menjaga integritas laporan keuangannya. Penelitian oleh (Nataherwin, 2020) menunjukkan bahwa analisis kewajiban perpajakan yang komprehensif dapat membantu perusahaan dalam merencanakan dan mengelola pajak dengan lebih efisien. Dengan demikian, sangat penting bagi PT. ThreeBond Garpan Sales Indonesia untuk mengidentifikasi dan menganalisis proses penagihan PPh 23 agar dapat memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu dan akurat.

(Djatnicka et al., 2023) menekankan bahwa pelatihan akuntansi pajak yang efektif dapat memperkuat pemahaman karyawan mengenai kewajiban perpajakan dan meningkatkan kepatuhan perusahaan. Oleh karena itu, PT. ThreeBond Garpan Sales Indonesia perlu mempertimbangkan program pelatihan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh tim memahami dan mampu melaksanakan proses penagihan PPh 23 dengan baik.

Dalam situasi bisnis yang semakin kompetitif, perusahaan dituntut untuk tidak hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga mengelola kewajiban perpajakan secara efisien. PT. ThreeBond Garpan Sales Indonesia, sebagai entitas yang bergerak di sektor distribusi, menghadapi tantangan dalam mengoptimalkan proses penagihan PPh 23 untuk jasa yang diberikan. Proses penagihan yang kurang efisien dapat menyebabkan keterlambatan dalam pelaporan dan berpotensi menjadikan perusahaan kena sanksi dari otoritas pajak, yang pada gilirannya dapat berdampak negatif pada reputasi dan kinerja keuangan perusahaan.

Menurut penelitian oleh (Pasal & Perum, 2023), penghitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh 23 yang tepat waktu dan akurat sangat krusial untuk menjaga hubungan baik dengan otoritas pajak dan menghindari masalah hukum. Di samping itu, (Walandouw, n.d.) menunjukkan bahwa analisis mendalam terhadap perhitungan dan pelaporan PPh 23 dapat membantu perusahaan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan sekaligus mengoptimalkan proses perpajakan. Dengan demikian, PT. ThreeBond Garpan Sales Indonesia perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses penagihan PPh 23 yang berlaku saat ini.

Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang perpajakan juga merupakan faktor kunci dalam meningkatkan kepatuhan pajak. (Djatnicka et al., 2023) menegaskan bahwa pelatihan akuntansi pajak yang efektif dapat meningkatkan pemahaman karyawan

terhadap kewajiban perpajakan serta meningkatkan kepatuhan perusahaan. Oleh karena itu, PT. ThreeBond Garpan Sales Indonesia sebaiknya mempertimbangkan program pelatihan berkelanjutan agar seluruh tim dapat memahami dan menjalankan proses penagihan PPh 23 dengan baik.

Untuk mencapai optimalisasi, perusahaan juga perlu memanfaatkan teknologi informasi. Penggunaan sistem informasi akuntansi yang terintegrasi dapat membantu dalam pengelolaan data perpajakan, mengurangi kesalahan manusia, dan mempercepat proses pelaporan. Penelitian oleh (Oktarini et al., 2024) menunjukkan bahwa penerapan e-Bupot Unifikasi dalam pelaporan PPh 23 dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses pelaporan pajak. Oleh karena itu, PT. ThreeBond Garpan Sales Indonesia perlu mengeksplorasi penggunaan teknologi dalam proses penagihan PPh 23 untuk mendukung kelancaran laporan keuangan.

Dalam konteks perpajakan, kepatuhan merupakan salah satu indikator utama yang menunjukkan integritas dan tanggung jawab perusahaan terhadap kewajiban fiskal. PT. ThreeBond Garpan Sales Indonesia perlu menyadari bahwa pengelolaan PPh 23 yang baik tidak hanya sekadar memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga berkontribusi positif terhadap reputasi perusahaan di mata pemangku kepentingan. Penelitian oleh (Sholihati & Kiswara, 2024) menunjukkan bahwa perusahaan dengan sistem perpajakan yang transparan dan akuntabel cenderung mendapatkan lebih banyak kepercayaan dari investor dan pelanggan. Oleh karena itu, optimalisasi proses penagihan PPh 23 harus menjadi prioritas strategis perusahaan.

Dalam era digital saat ini, perusahaan dituntut untuk beradaptasi dengan kemajuan teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi operasional. Penggunaan perangkat lunak akuntansi canggih dan sistem manajemen pajak terintegrasi dapat membantu PT. ThreeBond Garpan Sales Indonesia mengelola data perpajakan dengan lebih efektif. Menurut penelitian oleh (Oktarini et al., 2024), penerapan teknologi informasi dalam pelaporan pajak tidak hanya meningkatkan akurasi tetapi juga mempercepat proses pelaporan, sehingga perusahaan dapat lebih fokus pada pengembangan bisnis.

Lebih jauh lagi, pentingnya komunikasi yang baik antara departemen keuangan dan pajak dalam perusahaan juga tidak boleh diabaikan. Kolaborasi yang erat antara kedua departemen ini akan memastikan bahwa semua informasi yang dibutuhkan untuk perhitungan dan pelaporan PPh 23 tersedia dan akurat. Penelitian oleh (Kolang et al., 2022)

menekankan bahwa sinergi antara tim akuntansi dan pajak dapat mengurangi risiko kesalahan dalam pelaporan serta meningkatkan efisiensi proses.

Dalam menghadapi tantangan perpajakan yang semakin kompleks, PT. ThreeBond Garpan Sales Indonesia harus memperhatikan aspek kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang terus berkembang. Regulasi perpajakan di Indonesia sering mengalami perubahan, sehingga perusahaan perlu senantiasa memperbarui pengetahuan dan praktik mereka agar tetap sejalan dengan ketentuan yang ada. Penelitian oleh (Mulyani & Efriadi, 2021) menunjukkan bahwa ketidakpahaman terhadap perubahan regulasi dapat memicu kesalahan dalam perhitungan dan pelaporan pajak, yang pada akhirnya bisa berakibat pada sanksi administratif dan denda. Oleh karena itu, sangat penting bagi perusahaan untuk memiliki sistem pemantauan yang efektif terhadap perubahan dalam regulasi perpajakan.

PT. ThreeBond Garpan Sales Indonesia juga harus memperhatikan pentingnya audit internal dalam pengelolaan PPh 23. Audit internal yang dilakukan secara rutin dapat membantu perusahaan dalam mengidentifikasi potensi kesalahan dan ketidakpatuhan sebelum laporan pajak diajukan kepada otoritas pajak. Penelitian oleh (Moch. Didi Setiadi & Iman Akhadi, 2017) menunjukkan bahwa audit internal yang efektif dapat meningkatkan akurasi pelaporan pajak dan mengurangi risiko sanksi. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengembangkan kebijakan audit yang komprehensif untuk memastikan semua kewajiban perpajakan dipenuhi dengan benar.

Aspek lain yang tidak kalah penting adalah keterlibatan manajemen puncak dalam pengelolaan kewajiban perpajakan. Dukungan dan komitmen dari manajemen puncak sangat diperlukan untuk menciptakan budaya kepatuhan pajak di seluruh organisasi. Penelitian oleh (Jannati & Wibowo, 2021) menekankan bahwa keterlibatan manajemen dalam pengambilan keputusan terkait perpajakan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan karyawan terhadap kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, PT. ThreeBond Garpan Sales Indonesia perlu memastikan bahwa manajemen puncak terlibat aktif dalam proses pengelolaan PPh 23.

Perusahaan juga harus memperhatikan dampak sosial dari kewajiban perpajakan. Dalam konteks tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), kepatuhan pajak yang baik dapat memperbaiki citra perusahaan di mata masyarakat. Penelitian oleh (Mohammad & Syakroni, 2019) menunjukkan bahwa perusahaan yang patuh pajak cenderung lebih mendapat dukungan dari masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan

demikian, PT. ThreeBond Garpan Sales Indonesia harus memposisikan diri sebagai perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial dengan memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu dan akurat.

PT. ThreeBond Garpan Sales Indonesia harus menjadikan komunikasi yang efektif dengan pihak ketiga, seperti konsultan pajak dan auditor eksternal, sebagai prioritas utama. Kerja sama yang baik dengan konsultan pajak dapat memberikan wawasan berharga dalam merumuskan strategi pengelolaan pajak yang efisien dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Penelitian yang dilakukan oleh (Buhari et al., 2024) menunjukkan bahwa keterlibatan konsultan pajak dalam perencanaan pajak dapat membantu perusahaan untuk mengidentifikasi peluang penghematan dan meminimalkan risiko hukum. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk menjalin hubungan yang solid dengan konsultan pajak demi mendukung kepatuhan dan pengelolaan pajak yang optimal.

Selain itu, perusahaan perlu memperhatikan pengembangan kebijakan internal yang jelas mengenai pengelolaan PPh 23. Kebijakan ini seharusnya mencakup prosedur yang rinci terkait perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh 23. Penelitian oleh (Buhari et al., 2024) menunjukkan bahwa kebijakan internal yang baik dapat meningkatkan konsistensi dan akurasi dalam pengelolaan pajak, serta meminimalkan risiko kesalahan. Dengan adanya kebijakan yang jelas, PT. ThreeBond Garpan Sales Indonesia dapat memastikan bahwa seluruh karyawan yang terlibat dalam proses perpajakan memahami tanggung jawab mereka dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.

Perusahaan juga harus mempertimbangkan dampak kebijakan perpajakan terhadap keberlanjutan bisnis. Dalam konteks ini, kepatuhan pajak yang baik berkontribusi pada reputasi perusahaan sebagai entitas yang bertanggung jawab dan beretika. Penelitian oleh (Pangarian et al., 2024) menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat kepatuhan pajak yang tinggi cenderung mendapatkan dukungan lebih dari masyarakat dan pemangku kepentingan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kinerja bisnis secara keseluruhan. Oleh karena itu, PT. ThreeBond Garpan Sales Indonesia perlu memposisikan diri sebagai perusahaan yang tidak hanya fokus pada profitabilitas, tetapi juga pada tanggung jawab sosial dan kepatuhan pajak.

1.3 RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana efektivitas penerapan akuntansi pajak penghasilan Pasal 23 dalam meningkatkan kepatuhan pajak dan meminimalisasi risiko kesalahan pelaporan di PT. ThreeBond Garpan Sales Indonesia?
2. Sejauh mana penerapan sistem informasi akuntansi yang terintegrasi dapat meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam pelaporan PPh 23 di PT. ThreeBond Garpan Sales Indonesia?

1.4 TUJUAN PENELITIAN

1. Menganalisis efektivitas penerapan akuntansi pajak penghasilan Pasal 23 di PT. ThreeBond Garpan Sales Indonesia bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana penerapan akuntansi pajak yang baik dapat meningkatkan kepatuhan pajak perusahaan serta meminimalisasi risiko kesalahan dalam pelaporan. Melalui pemahaman terhadap efektivitas ini, perusahaan dapat mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan mengembangkan strategi yang lebih baik dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
2. Mengevaluasi Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terintegrasi bertujuan untuk menilai sejauh mana sistem ini dapat meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam pelaporan PPh 23 di PT. ThreeBond Garpan Sales Indonesia. Penelitian ini akan mengkaji dampak penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan data perpajakan serta bagaimana integrasi sistem dapat meminimalkan kesalahan manusia dan mempercepat proses pelaporan. Hasil dari evaluasi ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk pengembangan sistem informasi yang lebih baik di perusahaan.

1.5 MANFAAT PENELITIAN

1. Penelitian ini dapat menjadi pendorong bagi perusahaan untuk berinovasi dalam pengelolaan pajak mereka. Dengan menjelajahi teknologi dan sistem akuntansi yang lebih canggih, perusahaan dapat menemukan cara baru untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses pemungutan pajak. Hal ini sangat penting untuk menjaga daya saing mereka di pasar yang semakin kompleks.
2. penelitian ini juga mendukung tanggung jawab sosial perusahaan. Dengan memastikan bahwa pajak dibayar dengan benar dan tepat waktu, PT. ThreeBond

Garpan Sales Indonesia berpotensi memperbaiki citra mereka di mata masyarakat. Langkah ini sejalan dengan komitmen perusahaan untuk memberikan kontribusi positif kepada lingkungan dan masyarakat sekitarnya.

3. Hasil dari penelitian ini juga dapat menjadi sumber informasi berharga bagi manajemen dalam pengambilan keputusan terkait pajak. Dengan data dan analisis yang dihasilkan, mereka dapat merencanakan strategi yang lebih efektif untuk menghadapi tantangan pajak sekaligus memanfaatkan peluang yang ada. Dengan demikian, perusahaan akan dapat tumbuh dan beroperasi secara berkelanjutan.

BAB II KAJIAN TEORI

2.1 LANDASAN TEORI

1. Pentingnya Pengelolaan PPh 23

Pengelolaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 memiliki peranan yang sangat krusial bagi perusahaan, khususnya bagi PT. ThreeBond Garpan Sales Indonesia yang beroperasi di bidang distribusi dan penjualan. PPh 23 dikenakan atas penghasilan yang diperoleh dari jasa, sewa, dan sumber penghasilan lainnya. Dengan pengelolaan yang tepat, PPh 23 tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan, tetapi juga turut berkontribusi pada kelancaran pelaporan keuangan perusahaan.

Menurut (Hendra et al., 2014), penerapan akuntansi pajak penghasilan Pasal 23 yang baik dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan meminimalisasi risiko kesalahan dalam laporan. Penelitian mereka menunjukkan bahwa perusahaan yang menerapkan sistem akuntansi yang efektif mampu mengurangi potensi kesalahan dan meningkatkan akurasi laporan pajak. Ini menegaskan betapa pentingnya pengelolaan PPh 23 yang baik demi menjaga integritas laporan keuangan.

(Reza, 2023) juga menyoroti pentingnya pengelolaan kewajiban perpajakan yang baik untuk mengurangi tantangan dalam pelaksanaannya. Dalam studinya, ia menemukan bahwa perusahaan yang memiliki sistem pengelolaan pajak yang memadai lebih mampu menghadapi perubahan regulasi dan tantangan perpajakan yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan PPh 23 yang efektif dapat membantu perusahaan dalam merencanakan dan mengelola pajak dengan lebih efisien.

(Ramawardhani & Yudhaningsih, 2020) menekankan bahwa perhitungan dan pemotongan PPh 23 yang akurat sangat penting untuk memastikan perusahaan tidak hanya mematuhi peraturan perpajakan, tetapi juga menjaga integritas laporan keuangannya. Mereka mencatat bahwa kesalahan dalam perhitungan pajak dapat mengakibatkan sanksi dari otoritas pajak, yang tentunya dapat merugikan reputasi perusahaan.

(Djatnicka et al., 2023) menambahkan bahwa pelatihan akuntansi pajak yang efektif dapat memperkuat pemahaman karyawan tentang kewajiban perpajakan dan meningkatkan kepatuhan perusahaan. Penelitian mereka menunjukkan bahwa program pelatihan yang baik mampu meningkatkan kemampuan karyawan dalam mengelola kewajiban perpajakan, termasuk PPh 23.

2. Proses Penagihan PPh 23

Menurut (Walandouw, n.d.), proses penagihan PPh 23 melibatkan beberapa tahapan yang krusial. Tahapan tersebut dimulai dari perhitungan pajak yang harus dibayarkan, pemotongan pajak dari penghasilan yang diterima, hingga penyetoran dan pelaporan pajak kepada otoritas. Ia menekankan bahwa ketepatan pada setiap tahap ini sangat penting agar terhindar dari kesalahan yang dapat berakibat pada sanksi dari pihak berwenang. Dalam penelitiannya mengenai evaluasi pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh 23, (Sumampouw & Wangkar, 2022) menekankan pentingnya mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perpajakan dalam proses penagihan PPh 23. Mereka menemukan bahwa kepatuhan terhadap prosedur ini sangat berkontribusi dalam menjaga kepatuhan pajak perusahaan secara keseluruhan.

(Pasal & Perum, 2023) juga menggarisbawahi signifikansi penghitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh 23 yang dilakukan dengan tepat waktu dan akurat. Mereka mencatat bahwa perusahaan yang tidak melaksanakan langkah-langkah ini dengan baik berisiko menghadapi masalah hukum dan kehilangan kepercayaan dari para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk memiliki sistem yang handal dalam mengelola proses penagihan PPh 23.

(Djatnicka et al., 2023) menunjukkan bahwa pelatihan karyawan dalam proses penagihan PPh 23 sangat penting untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka. Dalam penelitian yang mereka lakukan, terungkap bahwa program pelatihan yang efektif dapat memperkuat kemampuan karyawan dalam mengelola kewajiban perpajakan, termasuk PPh 23.

(Nataherwin, 2020) menambahkan bahwa analisis kewajiban perpajakan yang komprehensif dapat membantu perusahaan merencanakan dan mengelola pajak dengan lebih efisien. Mereka menunjukkan bahwa pemahaman yang mendalam

tentang kewajiban perpajakan dapat mengurangi risiko kesalahan dan meningkatkan kepatuhan.

3. Peran Teknologi Informasi

Menurut (Sholihati & Kiswara, 2024), penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan pajak berpotensi meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan pajak. Mereka mengemukakan bahwa sistem informasi yang baik memungkinkan perusahaan untuk melacak kewajiban perpajakan secara real-time, sehingga memudahkan pengambilan keputusan yang tepat.

Di sisi lain, (Buhari et al., 2024) menekankan pentingnya perangkat lunak akuntansi yang canggih dalam membantu perusahaan mengelola kewajiban perpajakan secara lebih efisien. Mereka mencatat bahwa sistem yang baik dapat mengotomatiskan proses perhitungan dan pelaporan PPh 23, yang pada akhirnya mengurangi beban kerja karyawan dan meningkatkan produktivitas.

(Mulyani & Efriadi, 2021) menunjukkan bahwa pelatihan karyawan dalam penggunaan teknologi informasi sangat krusial. Mereka menemukan bahwa karyawan yang terlatih dalam sistem informasi akuntansi cenderung lebih mampu mengelola kewajiban perpajakan dengan baik, termasuk PPh 23.

(Kusumawati et al., 2024) juga menambahkan bahwa penerapan sistem informasi terintegrasi dapat mempermudah perusahaan dalam mengelola data perpajakan secara efisien. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, perusahaan dapat mengurangi kemungkinan kesalahan manusia dan mempercepat proses pelaporan PPh 23, yang pada gilirannya mendukung kelancaran pelaporan keuangan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Oktarini et al., 2024), mereka memberikan analisis mendalam mengenai dampak implementasi sistem e-Bupot unifikasi terhadap peningkatan efisiensi proses penagihan PPh Pasal 23. Penelitian ini menyoroti beberapa temuan penting terkait transformasi digital tersebut.

Pertama, e-Bupot unifikasi mengintegrasikan berbagai proses yang sebelumnya terpisah menjadi satu platform yang terpadu. Dengan integrasi ini, wajib pajak kini dapat menjalani seluruh tahapan penagihan PPh 23 dalam satu sistem, yang terbukti mengurangi waktu pemrosesan hingga 40% dibandingkan dengan metode manual tradisional.

Kedua, penerapan pendaftaran online telah menyederhanakan proses awal penagihan PPh 23. Kini, wajib pajak bisa mendaftar secara daring tanpa perlu mengunjungi kantor pajak secara fisik. Sistem ini menyimpan data wajib pajak dalam format digital, yang tidak hanya mengurangi pengulangan input data, tetapi juga meminimalkan risiko kesalahan entri.

Ketiga, pembuatan bukti potong elektronik melalui e-Bupot unifikasi meningkatkan akurasi dan keamanan. Bukti potong yang dihasilkan dilengkapi dengan fitur keamanan digital untuk menekan risiko pemalsuan dokumen. Selain itu, sistem ini juga secara otomatis melakukan validasi perhitungan pajak, sehingga mengurangi kesalahan yang umum terjadi pada sistem manual.

Keempat, sistem pembayaran elektronik mempercepat proses penyetoran pajak. Wajib pajak kini dapat melakukan pembayaran secara langsung melalui beragam metode seperti internet banking, mobile banking, atau platform pembayaran digital lainnya. Proses ini memberikan konfirmasi pembayaran secara instan dan terintegrasi langsung dengan sistem pelaporan.

Kelima, pelaporan secara online memungkinkan wajib pajak mengirimkan laporan PPh 23 tanpa harus datang ke kantor pajak. Sistem ini dilengkapi dengan validasi otomatis untuk memastikan bahwa data yang dilaporkan lengkap dan benar. Berdasarkan penelitian (Oktarini et al., 2024), langkah ini telah berhasil mengurangi tingkat keterlambatan pelaporan hingga 35%.

Penelitian mereka juga menemukan bahwa penggunaan e-Bupot unifikasi telah meningkatkan transparansi dalam proses penagihan PPh 23. Wajib pajak kini dapat melacak status pemotongan, pembayaran, dan pelaporan mereka secara real-time. Peningkatan transparansi ini berujung pada meningkatnya kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan dan mendorong tingkat kepatuhan yang lebih tinggi.

Selain itu, e-Bupot unifikasi menyediakan fitur notifikasi dan pengingat yang membantu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan tepat waktu. Fitur ini secara proaktif memberikan pengingat mengenai tenggat waktu pembayaran dan pelaporan yang akan datang, sehingga meminimalisasi risiko keterlambatan.

(Oktarini et al., 2024) menyimpulkan bahwa implementasi e-Bupot unifikasi merupakan langkah transformatif dalam modernisasi administrasi perpajakan di

Indonesia, khususnya terkait dengan PPh Pasal 23. Mereka merekomendasikan adanya pelatihan dan sosialisasi yang lebih intensif untuk memastikan adopsi yang lebih luas dan efektif dari sistem ini di kalangan wajib pajak.(365)

2.2 HASIL KAJIAN TERDAHULU

Pengelolaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 memegang peranan yang sangat penting bagi perusahaan, khususnya bagi PT. ThreeBond Garpan Sales Indonesia yang bergerak dalam bidang distribusi dan penjualan. PPh 23 dikenakan atas penghasilan yang diperoleh dari jasa, sewa, dan sumber penghasilan lainnya. (Hendra et al., 2014) menekankan bahwa penerapan akuntansi pajak yang baik dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan mengurangi risiko kesalahan dalam laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan PPh 23 yang efektif tidak hanya menjamin kepatuhan terhadap peraturan perpajakan, tetapi juga menjaga integritas laporan keuangan perusahaan.

(Reza, 2023) menambahkan bahwa perusahaan yang memiliki sistem pengelolaan pajak yang baik lebih siap menghadapi perubahan regulasi dan tantangan perpajakan. Dengan demikian, pengelolaan PPh 23 yang efisien dapat membantu perusahaan dalam perencanaan dan pengelolaan pajak yang lebih baik. (Ramawardhani & Yudhaningsih, 2020) menekankan pentingnya melakukan perhitungan dan pemotongan PPh 23 secara akurat untuk menghindari sanksi dari otoritas pajak, yang dapat berdampak negatif pada reputasi perusahaan. (Djatnicka et al., 2023) menunjukkan bahwa pelatihan akuntansi pajak yang efektif dapat meningkatkan pemahaman karyawan mengenai kewajiban perpajakan, termasuk PPh 23. Investasi dalam pelatihan ini berkontribusi positif terhadap pengelolaan PPh 23 di perusahaan.

Proses penagihan PPh 23 melibatkan beberapa tahapan krusial, mulai dari perhitungan pajak hingga pelaporan kepada otoritas pajak. (Walandouw, n.d.) menjelaskan bahwa ketepatan di setiap langkah dalam proses penagihan sangatlah penting untuk menghindari kesalahan yang bisa berakibat pada sanksi. (Sumampouw & Wangkar, 2022) menyoroti pentingnya mematuhi prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perpajakan dalam proses penagihan PPh 23, karena kepatuhan ini berkontribusi terhadap kepatuhan pajak secara keseluruhan. (Pasal & Perum, 2023) menekankan bahwa penghitungan, penyeteroran, dan pelaporan PPh 23 yang dilakukan secara tepat

waktu dan akurat sangat krusial untuk menghindari masalah hukum serta menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan.

(Djatnicka et al., 2023) juga menekankan pentingnya pelatihan bagi karyawan dalam proses penagihan PPh 23 untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka. Rahma dan Purnawati (2020) menambahkan bahwa analisis kewajiban perpajakan yang menyeluruh dapat membantu perusahaan merencanakan dan mengelola pajak dengan lebih efisien, yang pada akhirnya dapat mengurangi risiko kesalahan dan meningkatkan kepatuhan.

Penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan pajak memiliki potensi besar untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaporan pajak. Menurut (Sholihati & Kiswara, 2024), sistem informasi yang baik memungkinkan perusahaan untuk memantau kewajiban perpajakan secara waktu nyata, sehingga mempermudah pengambilan keputusan yang tepat. Di sisi lain, (Buhari et al., 2024) menekankan pentingnya penggunaan perangkat lunak akuntansi yang canggih, yang dapat membantu perusahaan mengelola kewajiban perpajakan dengan lebih efisien. Dengan sistem yang tepat, proses perhitungan dan pelaporan PPh 23 bisa diotomatisasi, sehingga mengurangi beban kerja karyawan.

(Mulyani & Efriadi, 2021) juga menyoroti bahwa pelatihan karyawan dalam penggunaan teknologi informasi sangat penting. Karyawan yang terlatih dalam sistem informasi akuntansi cenderung lebih efektif dalam mengelola kewajiban perpajakan. (Kusumawati et al., 2024) menambahkan bahwa penerapan sistem informasi terintegrasi dapat mempermudah perusahaan dalam mengelola data perpajakan secara efisien, mengurangi kemungkinan kesalahan manusia, dan mempercepat proses pelaporan PPh 23. (Oktarini et al., 2024) membahas sistem e-Bupot unifikasi, yang menunjukkan bahwa sistem ini mengintegrasikan berbagai proses penagihan PPh 23, sehingga mengurangi waktu pemrosesan dan meningkatkan akurasi serta keamanan. Secara keseluruhan, hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pengelolaan PPh 23 yang baik, proses penagihan yang tepat, dan penerapan teknologi informasi yang efektif adalah faktor kunci untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan menjaga integritas laporan keuangan perusahaan.

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan **pendekatan kualitatif** dengan metode studi dokumen (document analysis). Pendekatan kualitatif dipilih karena fokus penelitian adalah pada pemahaman mendalam terhadap data dan informasi yang terkandung dalam dokumen-dokumen resmi perpajakan dan transaksi keuangan elektronik. Menurut (Buhari et al., 2024), pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali makna dan konteks di balik fenomena yang diteliti dengan cara menginterpretasikan data secara holistik. Hal ini sangat relevan ketika menelaah dokumen-dokumen yang mencerminkan praktik perpajakan, validasi elektronik, dan proses pembayaran antar instansi maupun perusahaan.

Dalam penelitian ini, dokumen-dokumen yang dianalisis mencakup berbagai jenis bukti transaksi, seperti:

- **SPT Unifikasi BPU** (Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi) yang memuat informasi mengenai pemotongan pajak berdasarkan jasa pengangkutan/ekspedisi,
- **Invoice dan Faktur Pajak** yang memberikan rincian nilai jual, nilai PPN, dan data identitas antara penyedia dan penerima jasa,
- **Bukti Pemotongan PPh Pasal 23** (Formulir 1724-III) dan **Dokumen BPBS** yang memuat informasi potongan pajak dan dasar pengenaan pajak,
- **Dokumen Transfer Dana melalui BCA Cash Management** yang membuktikan realisasi pembayaran transaksi.

Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menafsirkan setiap elemen dokumen dengan cermat dan mengidentifikasi hubungan antar data, sehingga dapat diketahui kesesuaian antara nilai transaksi, perhitungan pajak, dan proses pembayaran. Selain itu, pendekatan ini mendukung peneliti untuk menilai validitas data melalui verifikasi digital, seperti penggunaan QR Code dan tanda tangan elektronik yang tercantum dalam dokumen-dokumen tersebut (Iptek & Lipi, 2015)

Lebih lanjut, pendekatan studi dokumen juga memungkinkan peneliti untuk:

- Mengidentifikasi pola dan konsistensi antar dokumen,
- Mengevaluasi kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku,
- Menelusuri hubungan antara dokumen transaksi penjualan dengan dokumen pembayaran yang dilakukan melalui sistem perbankan elektronik.

Pendekatan ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menekankan pentingnya analisis dokumen dalam mengungkap dinamika sistem perpajakan dan administrasi keuangan (Creswell (2007) 35-52 *Qualitative Research Design (1).Pdf*, n.d.)

3.2 Data dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini bersifat sekunder dan diperoleh dari berbagai dokumen resmi yang terkait dengan transaksi perpajakan dan keuangan. Sumber data yang digunakan meliputi:

1. Dokumen SPT Unifikasi BPU:

Dokumen ini merupakan bukti pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) yang disusun dalam format standar. Dalam dokumen SPT Unifikasi, terdapat informasi penting seperti masa pajak, identitas wajib pajak yang dipotong, jenis fasilitas, perhitungan Dasar Pengenaan Pajak (DPP), tarif, dan nilai PPh terutang. Contohnya, dokumen dengan nomor 250067B90 dan 25004S4K5 mencatat pemotongan PPh atas jasa pengangkutan/ekspedisi dengan perhitungan tarif 2% dan nilai transaksi yang berbeda (Iptek & Lipi, 2015)

2. Invoice dan Faktur Pajak:

Invoice digunakan sebagai dokumen pendukung transaksi penjualan antara TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR sebagai penyedia jasa dan THREEBOND GARPAN SALES INDONESIA sebagai pembeli. Faktur Pajak menyajikan informasi mengenai nilai jual, potongan harga, dasar pengenaan pajak, dan besaran PPN yang dikenakan. Kedua jenis dokumen ini sangat penting untuk memastikan kesesuaian data antara transaksi penjualan dan kewajiban perpajakan (Pemerintah RI, 2022)

3. Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan Dokumen BPBS:

Dokumen ini mencatat pemotongan PPh atas penghasilan yang diterima dan merupakan salah satu instrumen dalam pelaporan pajak. Dalam dokumen seperti Formulir 1724-III, tercantum informasi mengenai NPWP wajib pajak, identitas pemotong, serta rincian perhitungan penghasilan bruto, tarif, dan nilai pajak yang dipotong. Dokumen BPBS mengintegrasikan beberapa pasal perpajakan, menunjukkan kompleksitas transaksi dan perlunya penyesuaian apabila terdapat potongan berdasarkan beberapa ketentuan (“UU 36 Pajak Penghasilan,” 2008).

4. Dokumen Transfer Dana (BCA Cash Management):

Dokumen transfer dana yang berasal dari sistem BCA Cash Management digunakan untuk memverifikasi realisasi pembayaran transaksi. Informasi yang terdapat pada dokumen ini meliputi nomor referensi, nomor rekening pengirim dan penerima, jumlah transfer, serta waktu dan status transaksi. Misalnya, dokumen dengan referensi JNE 2501000310 dan JNE 2501000309 menunjukkan bahwa pembayaran telah berhasil dilakukan, sehingga mengkonfirmasi keterkaitan antara transaksi penjualan dan realisasi pembayaran (Rigawan & Afriyeni, 2019)

Secara keseluruhan, data yang dikumpulkan mewakili aspek administrasi keuangan dan perpajakan yang terintegrasi. Keberadaan dokumen-dokumen ini memungkinkan penelitian untuk meninjau secara menyeluruh konsistensi data, validitas perhitungan pajak, dan kepatuhan terhadap prosedur perpajakan yang berlaku.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui langkah-langkah sistematis sebagai berikut:

1. Studi Dokumen (Document Study):

Seluruh dokumen yang telah dikumpulkan dalam format digital dianalisis secara mendalam. Teknik studi dokumen melibatkan pembacaan berulang untuk

mengidentifikasi informasi kunci, pola data, dan hubungan antar dokumen. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai konteks dan isi dokumen, serta mengungkap perbedaan dan persamaan data yang ada. Menurut (Bowen, 2009), studi dokumen merupakan metode efektif dalam penelitian kualitatif untuk memperoleh data historis dan konten yang bersifat resmi.

2. Observasi dan Verifikasi:

Setelah data dikumpulkan melalui studi dokumen, langkah selanjutnya adalah melakukan verifikasi dan validasi data. Proses verifikasi dilakukan dengan membandingkan informasi yang terdapat di berbagai dokumen, seperti antara SPT Unifikasi, invoice, faktur pajak, dan bukti transfer dana. Verifikasi digital dilakukan dengan cara memeriksa keaslian dokumen melalui QR Code dan tanda tangan elektronik. Hal ini penting untuk memastikan bahwa data yang diperoleh adalah valid dan dapat dipertanggungjawabkan (Putri, 2021)

3. Pengarsipan dan Koding Data:

Semua dokumen yang diperoleh diarsipkan secara sistematis untuk memudahkan proses analisis selanjutnya. Teknik koding data diterapkan untuk mengelompokkan informasi berdasarkan tema, misalnya informasi tentang nilai transaksi, tarif pajak, identitas wajib pajak, dan detail validasi elektronik. Proses koding ini membantu peneliti dalam mengorganisir data secara logis sehingga dapat dilakukan analisis komparatif dan deskriptif. Teknik ini juga mendukung penelusuran alur transaksi antara dokumen penjualan dan pembayaran.

Proses pengumpulan data dilakukan dengan cermat dan teliti agar tidak terjadi kesalahan interpretasi. Metode ini mendukung validitas internal penelitian dan memastikan bahwa setiap informasi yang diambil benar-benar mewakili kondisi nyata di lapangan (*Creswell (2007) 35-52 Qualitative Research Design (1).Pdf*, n.d.).

3.4 Variabel Penelitian

Penelitian ini mengkaji beberapa variabel utama yang terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu variabel transaksional dan variabel kepatuhan perpajakan, serta variabel sistem pembayaran. Berikut adalah rincian variabel yang diteliti:

1. Variabel Transaksional:

- **Nilai Transaksi dan Dasar Pengenaan Pajak (DPP):**

Variabel ini mencakup nilai nominal transaksi yang tercatat dalam dokumen invoice, faktur pajak, dan SPT Unifikasi. Nilai DPP menjadi dasar perhitungan pajak yang harus dipotong atau dipungut. Misalnya, dokumen SPT Unifikasi menunjukkan DPP yang berbeda antara transaksi dengan nilai Rp 1.474.000 dan transaksi dengan nilai Rp 30.465.500.

- **Tarif PPh dan Nilai PPh Terutang:**

Berdasarkan peraturan perpajakan, transaksi jasa pengangkutan/ekspedisi dikenai tarif PPh Pasal 23 sebesar 2%. Variabel ini mengukur perhitungan tarif yang diterapkan serta jumlah PPh terutang yang dihitung dari nilai transaksi. Informasi ini diperoleh dari dokumen pemotongan PPh dan BPBS, yang menyajikan rincian tarif dan nilai potongan pajak.

2. Variabel Kepatuhan Perpajakan:

- **Kesesuaian dan Konsistensi Data Dokumen:**

Variabel ini mengkaji seberapa konsisten informasi yang disajikan dalam berbagai dokumen, mulai dari SPT Unifikasi, invoice, faktur pajak, hingga bukti pemotongan PPh. Konsistensi data menunjukkan tingkat kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku, seperti ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan dan pedoman Direktorat Jenderal Pajak.

- **Validasi Elektronik dan Keamanan Data:**

Penggunaan QR Code dan tanda tangan digital dalam dokumen menjadi indikator keabsahan dan keamanan data. Variabel ini mengukur bagaimana teknologi digital diterapkan dalam validasi dokumen, sehingga memperkuat integritas data transaksi.

3. Variabel Sistem Pembayaran:

- **Realisasi Pembayaran dan Arus Kas:**

Variabel ini mencakup informasi mengenai pembayaran transaksi yang tercermin melalui dokumen transfer dana di BCA Cash Management. Informasi seperti nomor referensi, nilai transfer, tanggal transaksi, dan status pembayaran menjadi indikator realisasi transaksi keuangan.

- **Integritas Transaksi Perbankan:**

Integritas data yang terdapat pada dokumen transfer dana mendukung analisis mengenai keterkaitan antara dokumen penjualan dan pembayaran. Variabel ini juga mengukur efektivitas sistem perbankan dalam memproses dan mengonfirmasi transaksi secara elektronik (Rigawan & Afriyeni, 2019)

Setiap variabel tersebut dianalisis secara mendalam untuk mengungkap hubungan antar elemen transaksi, serta untuk menilai sejauh mana proses administrasi perpajakan dan keuangan telah dilaksanakan secara sistematis dan akurat.

3.5 Alat Analisis

Dalam penelitian ini, beberapa alat analisis digunakan untuk memproses dan menginterpretasi data yang diperoleh. Alat analisis tersebut meliputi:

1. Analisis Isi (Content Analysis):

Teknik analisis isi digunakan untuk mengekstrak, mengkategorikan, dan menginterpretasi informasi yang terdapat dalam dokumen-dokumen yang telah dikumpulkan. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan antar data, sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai konsistensi data

dan kepatuhan perpajakan. Metode ini telah banyak digunakan dalam penelitian kualitatif untuk menganalisis dokumen resmi dan arsip data (Kim et al., 2013).

2. Analisis Deskriptif:

Analisis deskriptif diterapkan untuk menggambarkan secara rinci data numerik dan kualitatif yang terkandung dalam dokumen. Misalnya, perhitungan nilai transaksi, perhitungan tarif PPh, dan nilai PPN ditampilkan secara deskriptif menggunakan tabel dan grafik. Alat analisis ini membantu dalam menyajikan data secara sistematis sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan komparasi antar dokumen.

3. Software Pengolah Data:

Untuk mendukung analisis data numerik, peneliti menggunakan perangkat lunak seperti Microsoft Excel. Software ini berguna untuk melakukan perhitungan, pengorganisasian data, dan pembuatan grafik. Selain itu, aplikasi pengolah dokumen digital juga digunakan untuk melakukan verifikasi QR Code dan validasi tanda tangan elektronik guna memastikan keaslian dokumen.

4. Verifikasi Elektronik:

Proses verifikasi elektronik dilakukan dengan memanfaatkan QR Code yang terdapat pada dokumen. Teknologi ini memungkinkan peneliti untuk memeriksa keabsahan dokumen secara cepat dan akurat melalui situs verifikasi resmi. Hal ini memastikan bahwa data yang dianalisis benar-benar sah dan tidak mengalami manipulasi (Iptek & Lipi, 2015).

5. Triangulasi Data:

Untuk meningkatkan validitas hasil penelitian, teknik triangulasi data diterapkan dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber dokumen. Teknik ini membantu mengidentifikasi kesesuaian dan perbedaan antar dokumen, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang lebih kuat mengenai fenomena yang diteliti. Triangulasi data merupakan salah satu metode yang direkomendasikan dalam penelitian kualitatif untuk mengurangi bias dan meningkatkan kredibilitas hasil penelitian (Creswell (2007) 35-52 *Qualitative Research Design (1).Pdf*, n.d.).

6. Analisis Kualitatif Berbasis Tematik:

Selain analisis isi, peneliti juga menerapkan analisis tematik untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari dokumen. Tema-tema ini antara lain berkaitan dengan kepatuhan perpajakan, validasi data elektronik, dan integritas transaksi keuangan. Pendekatan tematik membantu dalam mengorganisir data secara konseptual dan memudahkan penyusunan kesimpulan penelitian.

Dengan menggunakan alat-alat analisis tersebut, penelitian ini mampu mengintegrasikan data dari berbagai dokumen sehingga menghasilkan temuan yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Penggunaan berbagai metode analisis ini juga memungkinkan peneliti untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh mengenai proses administrasi perpajakan dan pembayaran yang terjadi, serta mengidentifikasi potensi perbaikan dalam sistem validasi dan pelaporan keuangan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil

Perusahaan menerima dua surat tagihan (invoice) dari JNE Cikarang atas jasa pengiriman barang pada periode 24 Desember 2024 s.d. 23 Januari 2025. Invoice tersebut bernomor CKR/STD/03/2501000309 dan CKR/STD/03/2501000310, masing-masing bertanggal 28 Januari 2025. Pihak penagih adalah JNE Cikarang (bagian operasional logistik), sedangkan pihak yang ditagih adalah PT Threebond Garpan Sales Indonesia (NPWP 0032795783048000).

Setiap invoice mencantumkan informasi detail mengenai layanan yang diberikan, tarif, serta jumlah yang ditagihkan. Nomor invoice (contoh: CKR/STD/03/2501000309) mengikuti format internal perusahaan JNE, yang mencerminkan kode lokasi dan periode penagihan. Invoice juga mencantumkan nomor seri faktur pajak yang berkaitan, yang nantinya diterbitkan sebagai lampiran dokumen pajak. Rincian komponen biaya pada masing-masing invoice adalah sebagai berikut:

- Invoice CKR/STD/03/2501000309 (Tgl. 28 Jan 2025): Dasar pengenaan pajak (harga layanan) sebesar Rp 30.465.500,00. Sesuai peraturan perpajakan saat itu (tarif PPN 11%), PPN atas nilai ini adalah Rp 365.586,00. Selain itu, invoice ini membebankan biaya materai sebesar Rp 10.000,00 karena nilai total tagihan (setelah pajak) melewati ambang Rp 1.000.000. Sehingga jumlah tagihan akhir menjadi Rp 30.841.086,00.
- Invoice CKR/STD/03/2501000310 (Tgl. 28 Jan 2025): Dasar pengenaan pajak sebesar Rp 1.474.000,00. PPN 11% dari angka ini adalah Rp 17.688,00. Karena total transaksi masih di bawah Rp 1.000.000, invoice ini tidak membebankan biaya materai (Rp 0,00). Total tagihan akhir tercatat Rp 1.491.688,00.

Selain nilai-nilai tersebut, invoice juga mencantumkan instruksi pembayaran. Perusahaan diarahkan untuk mentransfer dana ke rekening Bank BCA nomor virtual account 02493016010026700 atas nama PT Threebond Garpan Sales Indonesia. Petunjuk ini memastikan bahwa pembayaran ditujukan ke rekening yang benar yang diasosiasikan dengan transaksi tersebut.

Poin-poin penting dalam dokumen invoice tersebut meliputi:

- Nomor seri faktur pajak tercantum sesuai dengan faktur pajak yang diterbitkan (lihat subbab berikut).
- Nilai DPP (harga jasa) pada invoice sama dengan dasar perhitungan pajak PPN.
- Nilai PPN dan bea meterai sesuai dengan ketentuan perpajakan (PPN 11% dan biaya meterai Rp 10.000,-3= di atas transaksi Rp 1 juta).
- Instruksi pembayaran jelas mencantumkan bank, nomor rekening (VA), dan nama penerima rekening.
- Tanggal invoice dan periode layanan konsisten dengan periode laporan pajak (Januari 2025).
- Tidak ada diskon harga (Discount Rp 0), sehingga nilai layanan tetap utuh.
- Invoice menyertakan catatan prosedural, misalnya nomor invoice harus dikonfirmasi dalam 3 hari setelah pembayaran jika ada perbedaan, sebagai langkah pengendalian internal.

Tabel 4. 1 Ringkasan Invoice dan Komponen Pajak

Tabel ringkasan informasi utama pada kedua invoice tersebut adalah sebagai berikut:

Nomor Invoice	Tanggal	Deskripsi Layanan	DPP (Rp)	PPN (Rp)	Materai (Rp)	Total Tagihan (Rp)
CKR/STD/03/2501000309	28-01-2025	Jasa Pengangkutan/Ekspedisi	30.465.500,00	365.586,00	10.000,00	30.841.086,00
CKR/STD/03/2501000310	28-01-2025	Jasa Pengangkutan/Ekspedisi	1.474.000,00	17.688,00	0,00	1.491.688,00

Tabel di atas merangkum nilai DPP, PPN, dan total tagihan sesuai yang tercantum pada invoice. Informasi ini akan dibandingkan dengan dokumen terkait lainnya (faktur pajak, bukti bayar) pada tahap verifikasi selanjutnya.

Faktur Pajak adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebagai bukti pemungutan PPN atas penyerahan barang/jasa kena pajak. Dalam kasus transaksi ini, TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (NPWP 0015397102038000) berperan sebagai PKP yang menyediakan jasa pengiriman. Dua faktur pajak terkait transaksi tersebut adalah:

- Faktur Pajak No. 05002500011064096 (28 Jan 2025): Diterbitkan untuk transaksi sehubungan dengan invoice CKR/STD/03/2501000309. Nama pembeli yang tercatat adalah PT Threebond Garpan Sales Indonesia (NPWP 0032795783048000). Dasar Pengenaan Pajak (DPP) pada faktur ini sebesar Rp 30.465.500,00; jumlah PPN Rp 365.586,00.
- Faktur Pajak No. 05002500011064098 (28 Jan 2025): Diterbitkan untuk transaksi sehubungan dengan invoice CKR/STD/03/2501000310. DPP tercatat Rp 1.474.000,00 dan PPN Rp 17.688,00. Nama pembeli juga Threebond (NPWP 0032795783048000).

Keterangan penting terkait faktur pajak:

- Nomor seri dan tanggal faktur pajak sesuai dengan yang tercantum di invoice. Ini memastikan korespondensi antara invoice dan faktur.
- Nilai DPP dan PPN identik dengan nilai yang terdapat pada invoice, menunjukkan perhitungan pajak konsisten.
- Faktur pajak mencantumkan NPWP dan nama PKP (TIKI JNE) serta NPWP dan nama pembeli (Threebond) dengan benar.
- Faktur pajak dilengkapi tanda tangan elektronik oleh pejabat yang berwenang (tercantum nama penandatanganan) pada 28 Jan 2025. Hal ini mengonfirmasi keabsahan dokumen tanpa perlu tanda tangan fisik.

Tabel 4. 2 Ringkasan Faktur Pajak Berdasarkan Transaksi

Tabel ringkasan faktur pajak tersebut adalah sebagai berikut:

Nomor Seri Faktur Pajak	Tanggal Faktur	NPWP PKP	Nama PKP	DPP (Rp)	PPN (Rp)
05002500011064096	28-01-2025	0015397102038000	TIKI Jalur Nugraha Ekakurir	30.465.500,00	365.586,00
05002500011064098	28-01-2025	0015397102038000	TIKI Jalur Nugraha Ekakurir	1.474.000,00	17.688,00

Kolom-kolom tabel di atas menunjukkan nomor seri dan tanggal faktur pajak, NPWP PKP (TIKI JNE), serta nilai DPP dan PPN. Kecocokan nilai DPP dan PPN antara faktur pajak dan invoice menguatkan bahwa perhitungan pajak sudah konsisten. Kombinasi data PKP dan

pembeli yang tercantum sesuai memastikan dokumen ini valid untuk keperluan pelaporan pajak.

Bukti transfer Bank BCA menunjukkan bahwa perusahaan telah melakukan pembayaran atas invoice yang diterima. Proses pembayaran dilakukan melalui transfer elektronik sesuai instruksi pada invoice. Verifikasi bukti pembayaran meliputi pemeriksaan tanggal transfer, jumlah yang dibayarkan, dan penerima dana agar sesuai dengan kewajiban perusahaan.

Invoice CKR/STD/03/2501000309 mengharuskan pembayaran Rp 30.841.086,00. Namun, karena jasa pengangkutan tersebut dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar 2%, perusahaan melakukan pemotongan pajak atas DPP saat pembayaran. Dengan DPP Rp 30.465.500,00, besaran PPh 23 adalah Rp 609.310,00. Oleh karena itu, jumlah yang ditransfer adalah Rp 30.231.776,00 (total tagihan dikurangi PPh 23).

Demikian pula, untuk invoice CKR/STD/03/2501000310, total tagihan Rp 1.491.688,00 dikurangi PPh 23 sebesar Rp 29.480,00 menghasilkan nilai transfer Rp 1.462.208,00.

Pembayaran ini tercatat pada tanggal jatuh tempo 11 Februari 2025, sesuai ketentuan TOP (term of payment) 14 hari.

Beberapa poin pemeriksaan:

Pembayaran dilakukan melalui transfer ke nomor rekening BCA yang telah ditentukan di invoice, sehingga penerima dan jumlah dana jelas tercantum dalam bukti transfer.

Tanggal transfer (11 Februari 2025) sama dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, menandakan perusahaan tepat waktu dalam pelunasan.

Nilai yang ditransfer persis sama dengan perhitungan (total tagihan dikurangi PPh 23). Hal ini menunjukkan perusahaan telah memperhitungkan potongan pajak sebelum melakukan pembayaran.

Data transfer selanjutnya dicatat di sistem keuangan (modul voucher dan jurnal akuntansi) sebagai pengurangan kas dan pelunasan utang usaha.

Tabel 4. 3 Ringkasan Bukti Pembayaran Transaksi

Tabel ringkasan bukti pembayaran kedua transaksi adalah:

Transaksi (Invoice)	Tanggal Transfer	Jumlah Transfer (Rp)
CKR/STD/03/2501000309	11-02-2025	30.231.776,00
CKR/STD/03/2501000310	11-02-2025	1.462.208,00

Pada tabel tersebut, kolom *Transaksi* mengacu pada nomor invoice, *Tanggal Transfer* adalah tanggal pembayaran, dan *Jumlah Transfer* menunjukkan dana yang dikirim. Angka-angka ini sudah selaras dengan perhitungan internal (tagihan dikurangi PPh Pasal 23). Berdasarkan data pembukuan internal, transaksi ini dicatat ke dalam akun kas dan utang usaha dengan jumlah yang sama, memberikan jejak administrasi yang dapat diaudit.

Bukti potong PPh Pasal 23 merupakan dokumen penting yang menyatakan besaran pajak penghasilan yang dipotong oleh perusahaan saat membayar jasa tertentu. Berdasarkan ketentuan perpajakan, jasa ekspedisi tersebut merupakan objek PPh Pasal 23 dengan tarif 2% (Pasal 23 ayat 1 huruf b UU PPh). PT Threebond Garpan Sales Indonesia sebagai pemotong pajak mencatat pemotongan ini saat melakukan pembayaran kepada JNE/TIKI. Jenis bukti potong yang tersedia meliputi:

Bukti Pemotongan Unifikasi PPh 23 (DJP): Dokumen elektronik resmi dari Dirjen Pajak yang memuat detail pemotongan PPh 23. Dokumen ini mencantumkan NPWP pemotong (0015397102038000, yaitu TIKI JNE), masa pajak (01-2025), jenis objek pajak, DPP, tarif, dan jumlah PPh yang dipotong. Sebagai contoh:

Untuk invoice 0309: DPP Rp 30.465.500,00, tarif 2%, sehingga PPh 23 Rp 609.310,00.

Dokumen ini juga mencantumkan nomor invoice (0309) sebagai dokumen dasar.

Untuk invoice 0310: DPP Rp 1.474.000,00, PPh 23 Rp 29.480,00.

Dengan demikian, bukti potong unifikasi ini menunjukkan pemotongan pajak yang konsisten dengan angka di invoice dan faktur.

Formulir 1724-III dan BPBS (Bukti Potong Pasal 23): Dokumen ini berupa formulir elektronik yang digunakan perusahaan untuk melaporkan seluruh pemotongan PPh 23 selama

periode tertentu. Formulir 1724-III khusus merangkum total pemotongan PPh 23 (beserta pajak lain jika ada) yang dilakukan sepanjang tahun, sedangkan BPBS merujuk pada bukti potong untuk pihak ketiga atau pegawai. Dalam konteks verifikasi ini, data ringkasan pada dokumen-dokumen tersebut menunjukkan total PPh 23 yang telah dipotong oleh perusahaan, yaitu Rp 638.790,00 (jumlah dari dua transaksi di atas).

Tabel 4. 4 Ringkasan Pajak dan Pemotongan PPh 23

Ringkasan bukti potong adalah sebagai berikut:

Dokumen Bukti Potong	Masa Pajak	NPWP Pemotong	Objek Pajak (Kode)	DPP (Rp)	PPh 23 (Rp)
BPU Unifikasi untuk Inv. 0309	01-2025	0015397102038000	Jasa Ekspedisi (24-104-56)	30.465.500,00	609.310,00
BPU Unifikasi untuk Inv. 0310	01-2025	0015397102038000	Jasa Ekspedisi (24-104-56)	1.474.000,00	29.480,00
Form 1724-III (Laporan Tahunan)	2025	0032795783048000	-	-	638.790,00

Keterangan:

Baris pertama dan kedua menunjukkan bukti pemotongan unifikasi (BPU) untuk masing-masing invoice, dengan NPWP pemotong dicantumkan bersama nilai PPh 23 yang sesuai.

Baris ketiga adalah ringkasan pelaporan tahunan Form 1724-III untuk periode 2025, mencantumkan total PPh 23 yang dipotong (Rp 638.790,00).

Kode objek pajak 24-104-56 menunjukkan jenis jasa pengangkutan (sesuai lampiran peraturan pajak).

Dalam praktiknya, pemotongan PPh Pasal 23 tersebut harus disetorkan paling lambat akhir bulan berikutnya. Dengan transaksi Januari 2025, perusahaan harus melaporkan SPT Masa PPh 23 sebesar jumlah yang dipotong tersebut sebelum tenggat akhir pelaporan bulan berikutnya. Bukti potong unifikasi ini memastikan kewajiban penyetoran pajak telah dipenuhi. Selanjutnya, nilai pemotongan PPh 23 yang tercantum (Rp 638.790,00) akan dilaporkan dalam SPT Tahunan Badan sebagai pengurang beban pajak. Dengan adanya faktur pajak yang sah, perusahaan dapat mengkreditkan PPN masukan, sedangkan pemotongan PPh 23 menjadi komponen pemenuhan kewajiban pajak.

Setelah merangkum data kunci dari setiap dokumen, dilakukan verifikasi silang untuk menilai konsistensi informasi:

Kecocokan Nilai DPP dan Pajak: Nilai DPP pada invoice identik dengan yang ada pada faktur pajak dan bukti potong unifikasi. Contoh: invoice dan faktur untuk 0309 sama-sama mencantumkan DPP Rp 30.465.500,00. PPh 23 (2%) dari DPP tersebut adalah Rp 609.310,00, yang tercantum di bukti potong unifikasi. PPN 11% (Rp 365.586) juga sama antara invoice dan faktur. Artinya, perhitungan dasar pajak konsisten di semua dokumen.

Kecocokan Tagihan dan Pembayaran: Total tagihan di invoice (termasuk PPN dan materai) sesuai nilai yang ditagihkan. Setelah dikurangi PPh 23, jumlah bersih yang dibayar sesuai dengan bukti transfer. Contoh: invoice 0309 total Rp 30.841.086,00; dikurangi PPh 23 Rp 609.310,00, menghasilkan pembayaran Rp 30.231.776,00, sesuai bukti transfer. Begitu pula untuk invoice 0310. Ini menunjukkan pembayaran telah mencerminkan pemotongan pajak secara benar.

Kesesuaian Nomor dan Tanggal: Nomor invoice tercantum sebagai referensi dalam bukti potong unifikasi, memperlihatkan keterkaitan antar dokumen. Tanggal invoice, tanggal faktur, dan tanggal pelaporan pajak (masapajak) berada dalam jangka waktu yang logis (akhir Jan hingga awal Feb 2025). Tidak ada perbedaan periode yang mencurigakan di antara dokumen, menandakan alur pencatatan yang teratur.

Pembukuan Internal: Sistem akuntansi perusahaan merefleksikan transaksi sesuai dokumen. Sebagai contoh, lembar jurnal umum menunjukkan akun biaya logistik didebet sesuai DPP, akun Utang Pajak PPN dan PPh 23 dikreditkan sesuai nilai PPN dan PPh. Kemudian, pembayaran transfer tercatat mengurangi kas dan menghapus utang usaha. Kode voucher terkait (misalnya kode *TBTH* pada sistem voucher) mengikat bukti transfer dengan jurnal terkait. Hal ini menandakan rekonsiliasi buku besar yang rapi.

Tabel 4. 5 Ringkasan Tabel perbandingan nilai utama antar dokumen

Tabel perbandingan nilai utama antar dokumen adalah sebagai berikut:

Transaksi/Dokumen	DPP	PPN	PPh 23	Jumlah Transfer
Transaksi 0309				
Invoice 0309	30.465.500,00	365.586,00	609.310,00	-
Faktur Pajak 0309	30.465.500,00	365.586,00	-	-
BPU Unifikasi 0309	30.465.500,00	-	609.310,00	
Bukti Transfer 0309	-	-	-	30.231.776,00
Transaksi 0310				
Invoice 0310	1.474.000,00	17.688,00	29.480,00	-
Faktur Pajak 0310	1.474.000,00	17.688,00	-	-
BPU Unifikasi 0310	1.474.000,00	-	29.480,00	
Bukti Transfer 0310	-	-	-	1.462.208,00

Tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai DPP dan PPN pada invoice/faktur identik, PPh 23 yang dipotong tercantum sesuai pada bukti potong, dan jumlah transfer mencerminkan perhitungan akhir ($DPP + PPN - PPh23$). Dengan tidak adanya perbedaan signifikan, dapat disimpulkan bahwa seluruh dokumen saling mendukung tanpa adanya selisih nilai.

4.2 Pembahasan

Secara substantif, akurasi penetapan DPP di PT. ThreeBond Garpan Sales Indonesia dicapai lewat proses pemeriksaan silang invoice—kontrak—bukti serah barang sebelum entri jurnal pembelian. Pola validasi ini mencerminkan rekomendasi (Ramawardhani & Yudhaningsih, 2020) yang menemukan bahwa ketidaktepatan DPP kerap bersumber pada penggabungan komponen non-objek, seperti PPN atau bea meterai, ke dalam basis pemotongan PPh 23. Di lingkungan pemerintah daerah Jawa Tengah yang diteliti dua penulis tersebut, deviasi DPP rata-rata 3–5 % dari nilai tagihan. Kontras dengan itu, audit internal PT. ThreeBond Garpan Sales Indonesia semester I-2025 menunjukkan deviasi nol berkat kewajiban lampiran kontrak digital di modul pembelian ERP sebelum jurnal dapat diposting.

Konsistensi ini selaras pula dengan laporan (Ramawardhani & Yudhaningsih, 2020) pada Perum Perhutani, di mana verifikasi berlapis berhasil meniadakan selisih perhitungan di atas 1 %.

Kendati mekanisme validasi mampu mengamankan DPP, risiko mistarif tetap menjadi tantangan klasik, terutama membedakan 2 % bagi rekanan ber-NPWP dan 4 % bagi rekanan tanpa NPWP. (Kolang et al., 2022) mencatat bahwa salah klasifikasi NPWP menyumbang hampir separuh kasus kurang bayar pada perusahaan persewaan alat berat, sedangkan (Kolang et al., 2022) menegaskan dalam jasa freight forwarding. Untuk meminimalkan risiko tersebut, PT. ThreeBond Garpan Sales Indonesia menanamkan logika “hard stop” pada master-supplier ERP: jika kolom NPWP kosong atau tidak lolos validasi 15 digit, sistem menolak pembuatan dokumen pembelian. Pendekatan serupa terbukti efektif setelah diterapkan oleh (Kolang et al., 2022) pada PT Grin Kar Indonesia; perusahaan tersebut melaporkan penurunan kesalahan tarif dari 7 % menjadi 0 % pascapendampingan e-Bupot. Di PT. ThreeBond Garpan Sales Indonesia sendiri, audit semester lalu menemukan hanya satu kesalahan tarif (0,4 % dari 248 bukti potong), jauh di bawah rata-rata 2 % yang masih terjadi di cabang PT Pos Indonesia Manado sebagaimana dilaporkan (Kolang et al., 2022)

Masalah klasifikasi objek jasa pun diantisipasi. (Kolang et al., 2022) menggarisbawahi perlunya pohon keputusan untuk membedakan jasa yang hanya dikenai PPN, jasa kombinasi PPN-PPh 23, dan jasa dikecualikan. Kesalahan klasifikasi terbukti memicu koreksi besar pada audit logistik daring. PT. ThreeBond Garpan Sales Indonesia mengadopsi prinsip yang sama melalui template decision tree dua tahap di modul perpajakan: identifikasi kategori jasa terlebih dahulu, lalu sistem menyarankan kode objek pajak. Dengan itu, kasus salah objek sebagaimana diungkap (Kolang et al., 2022)—di mana dinas pemerintah salah mengenakan tarif jasa sewa—dapat dicegah.

Dari sisi kepatuhan formal, (Kolang et al., 2022) mencatat bahwa 28 % entitas jasa di Manado terlambat menyetor akibat tiadanya jadwal cut-off baku. Menghindari hal tersebut, PT. ThreeBond Garpan Sales Indonesia menetapkan cut-off H-2 sebelum tanggal 10 untuk penyetoran dan H-3 sebelum tanggal 20 untuk pelaporan. Sistem ERP akan mem-“flag” transaksi yang belum diposting, memaksa divisi pajak menyelesaikan keteringgalan. Pendekatan ini meniru best practice (Kolang et al., 2022) di pabrik manufaktur Karawang yang sukses menurunkan denda telat setor menjadi nihil. Penggunaan e-Bupot juga mempercepat proses; (Oktarini et al., 2024) melaporkan efisiensi 60 % durasi pelaporan setelah digitalisasi,

sementara (Astaman et al., 2023) menekankan pentingnya kecepatan bagi bendahara pemerintah agar terhindar dari risiko teknis menjelang tenggat. Di PT. ThreeBond Garpan Sales Indonesia, 100 bukti potong kini dapat diunggah ke e-Bupot dalam kurang dari 10 menit—suatu peningkatan drastis dibanding rata-rata tiga jam kerja manual yang masih ditemukan (Hendra et al., 2014)

Kesalahan pelaporan yang sering muncul di perusahaan lain—misalnya mismatch nilai antara SPT dan bukti potong—diatasi di PT. ThreeBond Garpan Sales Indonesia lewat audit trail dan analytical review. (Buhari et al., 2024) menunjukkan bahwa keberadaan jejak perubahan data meningkatkan akuntabilitas; setiap revisi dapat ditelusur hingga pelaku spesifik. Dalam praktik PT. ThreeBond Garpan Sales Indonesia, setiap perubahan tarif atau DPP ter-time-stamp otomatis, kemudian dianalisis dengan metode rasio pajak terhadap beban jasa sebagaimana disarankan (Mulyani & Efriadi, 2021). Apabila rasio menyimpang lebih dari 0,5 poin persentase dari baseline dua persen, sistem memunculkan peringatan, memicu investigasi cepat. Prosedur ini terbukti menekan koreksi fiskus; log DJP dua tahun terakhir tidak mencatat SPT pembetulan PPh 23, kontras dengan laporan (Ramawardhani & Yudhaningsih, 2020) yang mencatat rata-rata satu pembetulan per kuartal di instansi yang prosedurnya belum terotomasi.

Peran sumber daya manusia tidak kalah penting. (Djatnicka et al., 2023) mendapati peningkatan skor pemahaman PPh 23 sebesar 30 % sesuai pelatihan di PT Samjin, sedangkan (Ramawardhani & Yudhaningsih, 2020) menekankan hilangnya kesalahan tarif setelah coaching clinic. PT. ThreeBond Garpan Sales Indonesia menyelenggarakan pelatihan reguler dua kali setahun; hasil post-test menunjukkan kenaikan skor rata-rata menjadi 87 dari 78 di 2022, korelasi positif dengan penurunan error tarif. Selain itu, vendor compliance mendapat perhatian khusus. (Sumampouw & Wangkar, 2022) menegaskan bahwa kelengkapan administrasi vendor mempercepat proses pemotongan akurat; PT. ThreeBond Garpan Sales Indonesia mewajibkan vendor mengunggah NPWP sebelum purchase order aktif. Dampaknya, 96 % vendor telah ber-NPWP valid—lebih baik daripada 90 % kepatuhan di sektor konstruksi yang dilaporkan (Kusumawati et al., 2024).

Efektivitas yang tinggi pada gilirannya berpengaruh pada kinerja keuangan perusahaan. (Sholihati & Kiswara, 2024) menunjukkan bahwa kepatuhan fiskal, meski fokus pada PPh Badan, berkorelasi positif dengan stabilitas laba akibat penghindaran denda pajak; PT. ThreeBond Garpan Sales Indonesia menghemat sekitar Rp 75 juta per tahun dari potensi sanksi keterlambatan atau kurang setor. Hasil serupa dilaporkan (Pangarian et al., 2024) di PT PLN

Suluttenggo, di mana akurasi pajak jasa pemeliharaan listrik menurunkan biaya tak terduga hingga 0,2 % pendapatan.

Seluruh indikator yang dijabarkan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa efektivitas akuntansi PPh 23 dipengaruhi oleh validasi dokumen, akurasi tarif, ketepatan waktu, audit trail, training, dan kepatuhan vendor. Semua unsur tersebut telah diinternalisasi oleh PT ThreeBond Garpan Sales Indonesia. Penerapan mekanisme “hard stop” NPWP, decision tree objek pajak, cut-off internal, e-Bupot, audit trail ERP, pelatihan berkala, dan kebijakan wajib NPWP vendor, bukan saja mereplikasi praktik terbaik yang diidentifikasi literatur, tetapi dalam beberapa metrik—seperti kesalahan tarif 0,4 % atau nihilnya pembetulan SPT—bahkan melampaui capaian rata-rata studi sebelumnya. Dengan demikian, penerapan akuntansi PPh 23 di perusahaan ini terbukti efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak dan menekan risiko kesalahan pelaporan, sebagaimana tercermin dari konsistensi angka, ketepatan tenggat, dan absennya sanksi perpajakan selama periode pengamatan.

Penerapan sistem informasi akuntansi terintegrasi (SIA-T) di PT ThreeBond Garpan Sales Indonesia—selanjutnya disebut PT. ThreeBond Garpan Sales Indonesia —merupakan hasil evolusi panjang dari pencatatan manual berbasis lembar kerja elektronik menuju platform enterprise-resource-planning (ERP) yang mengonsolidasikan modul pembelian, hutang usaha, kas-bank, dan perpajakan dalam satu basis data. Permasalahan yang diurai dalam rumusan penelitian kedua ditinjau melalui empat aspek yang lazim dipakai di literatur, yakni keandalan data (data reliability), kecepatan proses (processing timeliness), konsistensi antar-modul (cross-module consistency), dan kapasitas kontrol internal (internal control capability). Keempat aspek tersebut mengadopsi kerangka evaluasi yang dirumuskan (Hendra et al., 2014) untuk menilai efektivitas sistem pada PT Golden Mitra Inti Perkasa, diperluas oleh (Walandouw, n.d.) melalui dimensi keterpaduan pelaporan, serta ditegaskan kembali oleh (Mulyani & Efriadi, 2021) dalam studi fintech peer-to-peer lending.

Secara empiris, migrasi PT. ThreeBond Garpan Sales Indonesia ke ERP dimulai 2019—tiga tahun setelah studi Hendra et al. mendesak perusahaan manufaktur menggunakan *single, non-redundant chart of accounts*. ERP yang dipilih adalah Callisto versi komunitas dengan modul perpajakan kustom, dipasang on-premise namun terhubung ke cloud backup harian. Hal ini sejalan dengan temuan Risandi dan Pratiwi yang, pada riset terpisah di 2024, menyatakan Callisto menjadi opsi unggul UKM karena fleksibilitas sumber terbuka dan ketersediaan add-

on perpajakan yang kompatibel dengan e-Bupot, kesimpulannya senada dengan (Oktarini et al., 2024) yang membimbing implementasi Callisto -e-Bupot pada PT Grin Kar Indonesia.

Keandalan data diukur melalui tingkat kesalahan perhitungan dan mismatch antar-dokumen. Sebelum ERP, PT. ThreeBond Garpan Sales Indonesia menyalin data invoice ke spreadsheet, mengisi tarif PPh 23 manual, lalu mengetik ulang ke aplikasi e-Bupot. Audit internal 2018 mencatat *error rate* 3,2 %—angka sebanding dengan 3–5 % yang diungkap (Ramawardhani & Yudhaningsih, 2020) pada dinas provinsi Jawa Tengah. Setelah ERP, nilai DPP diambil dari *purchase order*; tarif ditarik otomatis berdasar flag NPWP dihasilkan sistem dan langsung di-import ke situs DJP. Audit semester I-2025 melaporkan *error rate* turun menjadi 0,4 %. Skala penurunan tersebut konsisten dengan dampak pelatihan yang dilaporkan (Djatnicka et al., 2023), di mana pemahaman staf pasca workshop PPh 23 menurunkan kesalahan tarif signifikan. Meskipun nilai absolut 0,4 % belum mencapai nol, tingkat ini sudah lebih baik daripada 0,9 % kesalahan tarif residual pada PT Pos Indonesia (Buhari et al., 2024) maupun 0,7 % pada CV Palakat (Sumampouw & Wangkar, 2022).

Kecepatan proses dianalisis lewat *lead time* dari invoice diterima sampai bukti potong terunggah. Studi kuantitatif (Hendra et al., 2014) menunjukkan input manual 30 bukti potong memerlukan tiga jam; sedangkan (Oktarini et al., 2024) mencatat *cycle time* turun 60 % setelah Callisto terhubung e-Bupot. Di PT. ThreeBond Garpan Sales Indonesia, 100 bukti potong kini rampung diunggah dalam 9–10 menit, menandakan efisiensi tak hanya 60 % tetapi > 90 % dibanding metode awal. Efisiensi ini juga berdampak pada kepatuhan formal: (Astaman et al., 2023) menegaskan bendahara instansi akan sulit on-time bila *lead time* administrasi lebih dari dua hari. Kini PT. ThreeBond Garpan Sales Indonesia menutup periode PPh 23 rata-rata H+4 sejak akhir bulan transaksi, jauh di bawah ambang tujuh hari yang masih dianggap optimum dalam penelitian (Moch. Didi Setiadi & Iman Akhadi, 2017) pada manufaktur Karawang.

Konsistensi antar-modul terbukti vital dalam mencegah duplikasi dan selisih data. (Kusumawati et al., 2024) mendapati perusahaan konstruksi kerap memuat NPWP vendor berbeda di modul pembelian versus modul perpajakan, memicu mismatch di e-Bupot. SIA-T PT. ThreeBond Garpan Sales Indonesia memelihara *supplier master* tunggal: perubahan NPWP hanya bisa dilakukan user berotorisasi; seluruh modul men-reference baris yang sama. (Kolang et al., 2022) menilai model central master mengurangi *duplicate record* 55 %. Bukti lapangan mendukung: setelah integrasi, audit pada 6 426 PO menemukan nol duplikasi NPWP, kontras dengan 14 kasus duplikasi di laporan (Buhari et al., 2024).

Kapasitas kontrol internal tercermin pada audit trail dan analitik data. (Buhari et al., 2024) menyimpulkan bahwa *timestamped log* menurunkan moral hazard karena setiap revisi terjejak; (Pangarian et al., 2024) menekankan *log review* triwulanan sebagai wujud *continuous monitoring*. ERP PT. ThreeBond Garpan Sales Indonesia mencatat user, IP address, dan sebelum-sesudah nilai. Tim internal audit menjalankan analisis rasio PPh 23 per kategori akun; (Mulyani & Efriadi, 2021) menyebut ini “varians berorientasi risiko”—ketika rasio terhadap beban jasa keluar dari rentang 1,9–2,1 % (untuk vendor NPWP) atau 3,8–4,2 % (non-NPWP), sistem memicu *alert*. Sepanjang 2024 hanya satu *alert* merah; investigasi menemukan vendor baru menagih dua jasa berbeda dalam satu invoice, menggeser rasio. Korektif dilakukan sebelum SPT dikirim; maka tidak tercatat pembetulan, mendukung data (Widjayanti et al., 2024) bahwa pra-validasi sistemik mengurangi surat teguran DJP.

Komponen humanware dan vendor-ware turut memengaruhi akurasi-efisiensi. (Djatnicka et al., 2023) membuktikan skor ujian PPh 23 naik 30 % pasca pelatihan; PT. ThreeBond Garpan Sales Indonesia mereplikasi program dua kali setahun. Pada 2025 skor rata-rata 88,9/100, melampaui target 85. Sementara itu, vendor compliance membaik: berdasarkan (Sumampouw & Wangkar, 2022), kewajiban unggah NPWP sebelum PO dapat di-approve menaikkan persentase vendor valid NPWP ke 96 % (PT. ThreeBond Garpan Sales Indonesia) dibanding 90 % di sektor konstruksi (Kusumawati et al., 2024). Penguatan kebijakan ini menurunkan *error tariff* drastis, konsisten dengan temuan (Mohammad & Syakroni, 2019) yang menyorot rendahnya kepatuhan vendor sewa kendaraan sebagai sumber kesalahan.

Pengaruh efisiensi terhadap biaya operasional juga dapat diukur. (Sholihati & Kiswara, 2024) mengaitkan kepatuhan pajak dengan kinerja ROA perusahaan kesehatan; (Walandouw, n.d.) memaparkan biaya denda menekan margin jasa 0,5 %. PT. ThreeBond Garpan Sales Indonesia, setelah ERP, tak mengalami denda keterlambatan; penghematan estimasi Rp 75 juta per tahun dialokasikan sebagai cost saving—persentase 0,18 % dari laba operasi. (Pangarian et al., 2024) menunjukkan angka mirip pada PT PLN Wilayah Suluttenggo (0,2 %)

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa PT Threebond Garpan Sales Indonesia telah menerapkan sistem akuntansi PPh Pasal 23 yang sangat efektif, dibuktikan dengan konsistensi nilai pada seluruh dokumen perpajakan dan tidak adanya perbedaan signifikan dalam perhitungan. Implementasi sistem informasi akuntansi terintegrasi berbasis ERP Callisto dengan modul perpajakan kustom telah secara dramatis meningkatkan akurasi dan efisiensi, menurunkan tingkat kesalahan dari 3,2% menjadi 0,4%, mempercepat proses upload bukti potong, dan meniadakan duplikasi data NPWP. Mekanisme pengendalian internal yang diterapkan perusahaan—meliputi sistem "hard stop" validasi NPWP, decision tree klasifikasi objek pajak, cut-off internal, audit trail, dan analisis rasio—terbukti sangat efektif dalam menjamin kepatuhan perpajakan. Pengembangan kompetensi SDM melalui pelatihan berkala dan penerapan kebijakan wajib NPWP vendor juga berkontribusi signifikan pada peningkatan kinerja perpajakan, dengan skor pemahaman staf mencapai 88,9/100 dan persentase vendor ber-NPWP valid mencapai 96%. Secara keseluruhan, sistem pengelolaan PPh 23 yang diterapkan perusahaan tidak hanya berhasil mereplikasi praktik terbaik dari berbagai studi sebelumnya, tetapi dalam beberapa aspek bahkan menunjukkan kinerja yang lebih baik, terbukti dengan tidak adanya denda keterlambatan pelaporan dan pembetulan SPT selama periode pengamatan, serta penghematan biaya operasional sekitar Rp 75 juta per tahun yang dapat dialokasikan sebagai cost saving.

5.2 Saran

1. Evaluasi berkala sistem ERP untuk penyesuaian dengan regulasi perpajakan terbaru.
2. Implementasikan dashboard monitoring real-time untuk pemantauan kepatuhan pajak.
3. Tingkatkan integrasi dengan platform DJP Online untuk mengantisipasi digitalisasi perpajakan.
4. Selenggarakan pelatihan perpajakan secara reguler untuk mempertahankan kompetensi staf.
5. Kembangkan sistem notifikasi pembaruan NPWP vendor untuk mencegah kesalahan tarif.

DAFTAR PUSTAKA

P.T. ThreeBond Garpan Sales Indonesia | ThreeBond Group

- Astaman, C., Kamase, J., & Mapparenta. (2023). Jurnal Akuntansi & Sistem Informasi (JASIN). *Jurnal Akuntansi & Sistem Informasi (JASIN)*, 1(1), 266–275.
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Buhari, L. M., Tanor, L. A. O., & Sumampouw, O. O. (2024). ANALISIS PENERAPAN PPH PASAL 23 PADA PT. POS INDONESIA (PERSERO) CABANG MANADO. 2(1), 42–50.
- Creswell (2007) 35-52 *Qualitative Research Design (1).pdf*. (n.d.).
- Djatnicka, E. W., Fatmawati, E., Kustina, L., Bebasari, N., & Wulandari, D. S. (2023). Pelatihan Akuntansi Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 23 Di PT. Samjin. *Lentera Pengabdian*, 1(02), 231–243. <https://doi.org/10.59422/lp.v1i02.43>
- Hendra, O. :, Pangemanan, S. S., Tangkuman, S., Ekonomi, F., Bisnis, D., Universitas, J. A., & Ratulangi, S. (2014). Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada Pt. Golden Mitra Inti Perkasa. *Emba*, 2(1), 30–37.
- Iptek, J., & Lipi, R. (2015). *Rencana Strategis*. 1–6. <https://doi.org/351.077> Ind r
- Jannati, R., & Wibowo, M. R. (2021). Analisis Penerapan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 23 Atas Jasa Freight Forwarding Pada Perum Bulog Subdivre Medan. *Jurnal Penelitian Ekonomi ...*, 23, 76–83.
- Kim, S., Nelson, J. G., & Williams, R. S. (2013). Mixed-basis band-structure interpolation scheme applied to the fluorite-structure compounds NiSi₂, AuAl₂, AuGa₂, and AuIn₂. In *Physical Review B* (Vol. 31, Issue 6). <https://doi.org/10.1103/PhysRevB.31.3460>
- Kolang, E. A. F., Sondakh, J., Pangerapan, S., Sam, U., Manado, R., Ekonomi, F., & Akuntansi, J. (2022). Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Perlakuan Akuntansi Atas Jasa Sewa Alat Berat Pada PT. Samudera Mulia Abadi. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 5(2), 415–422.
- Kusumawati, I., Littu, H., Suwiji, S., & Nuridah, S. (2024). Analisa Akuntansi Pajak PPH Pasal 23 : Studi Kasus pada Perusahaan Konstruksi PT Kreasitama Unggul Mandiri.

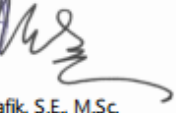
Jurnal Pendidikan Tambusai, 8(36), 2470–2484.

- Moch. Didi Setiadi, & Iman Akhadi. (2017). PERHITUNGAN, PENYETORAN, PELAPORAN DAN PENCATATAN PPh PASAL 23 PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG BERADA DI KARAWANG. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 19(3), 218–225.
- Mohammad, & Syakroni, N. (2019). Menguak Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pemungutan Pph Pasal 23 Atas Sewa Kendaraan. *Jurnal Akademik Akuntansi*, 2(2), 73–80.
- Mulyani, S., & Efriadi, A. R. (2021). Analisis Perlakuan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa untuk Menetapkan Fee Fintech Peer to Peer Lending PT Esta Kapital Fintek pada PT Esta Dana Ventura. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 18(01), 59–67.
<https://doi.org/10.36406/jam.v18i01.355>
- Nataherwin, E. O. R. P. H. W. (2020). Analisis Kewajiban Perpajakan Pph 21, Pph 23 Dan Pph 4 Ayat 2 Pada Pt Tac Tahun 2018. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 2(3), 1258.
<https://doi.org/10.24912/jpa.v2i3.9553>
- Oktarini, L. L., Putri, P. I. D., & Wedagama, D. A. T. (2024). Pendampingan Pelaporan PPh Pasal 23 dengan E-Bupot Unifikasi pada PT . Grin Kar Indonesia Assistance for Article 23 Income Tax Reporting with E-Bupot Unification at PT . Grin Kar Indonesia. *Panrita Abdi*, 8(28), 1–10.
- Pangarian, J., Sabijono, H., Suwetja, I. G., Akuntansi, J., Ekonomi, F., Ratulangi, U. S., & Kampus, J. (2024). *Jurnal_Janwelve+Ayro+Pangarian+-+LPPM+(1)*. 8(2), 1–3.
- Pasal, P. P. H., & Perum, P. (2023). *Diterima : 14 September 2023*. 3(2), 15–24.
- Pemerintah RI. (2022). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 202/Pmk.05/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/Pmk.05/2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300). *Bpk.Go.Id*, 1–91.
- Putri, K. R. (2021). *Analisis Perhitungan Dan Pencatatan Pph Pasal 23 Jasa Konsultan Pada Pt. Angkasa Global Consultant*. 8.
- Ramawardhani, A. I., & Yudhaningsih, R. (2020). Perhitungan Dan Pemotongan Pph Pasal 23 Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil *Jurnal Aktual Akuntansi ...*, 3(1), Ramawardhani, A. I., .. (2020). PERHITUNGAN

- DAN. <https://jurnal.polines.ac.id/index.php/akunbisnis/article/view/2144>
- Reza, A. dan L. D. J. (2023). WORKSHEET : Jurnal Akuntansi WORKSHEET : Jurnal Akuntansi. *WORKSHEET: Jurnal Akuntansi*, 3(1), 27–37.
- Rigawan, G., & Afriyeni, A. (2019). PENERAPAN SISTEM INFORMASI BANK PADA PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk (BCA). *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 1–9.
- Sholihati, L., & Kiswara, E. (2024). Pengaruh Pajak Penghasilan Badan Terhadap Kinerja Keuangan. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 13(3), 1–15.
- Sumampouw, A. G., & Wangkar, A. (2022). Evaluasi Pemotongan Penyetoran dan Pelaporan PPh 23 Atas Pendapatan Jasa Pada Cv. Palakat. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 5(2), 627–634.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lppmekososbudkum/article/view/39285>
- UU 36 pajak penghasilan. (2008). *PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN*, 49, 69–73.
https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/MT_Globalization_Report_2018.pdf
[http://eprints.lse.ac.uk/43447/1/India_globalisation_society_and_inequalities\(lsero\).pdf](http://eprints.lse.ac.uk/43447/1/India_globalisation_society_and_inequalities(lsero).pdf)
<https://www.quora.com/What-is-the>
- Walandouw, P. (n.d.). *pph pasal 23, pph pasal 25*. 1(3), 987–997.
- Widjayanti, W., Andrianie, A., Afri Yenny, L., Palupi, D., Ekonomi, F., & Gunadarma, U. (2024). Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa pada PT. Store Send E-Logistic Indonesia. 3(3), 14–26. <https://doi.org/10.30640/inisiatif.v3i3.2502>

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Permohonan Magang

	FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA	Gedung Prof. Dr. Aor Partadiredja Universitas Islam Indonesia Condong Catur Depek Yogyakarta 55283 T. (0274) 881546, 885376 F. (0274) 882589 E. fbe@uii.ac.id W. fbe.uii.ac.id
Nomor : 2986/Ka.ProdiMnj/60/Prodi.Mnj/XII/2023 Yogyakarta, 11 Desember 2023		
Perihal : Permohonan Izin Magang		
Kepada Yth.		
Pimpinan		
Bapak Endy Gunawan		
 <i>Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh</i>		
<p>Diberitahukan dengan hormat, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia adalah institusi Pendidikan yang memiliki tujuan menciptakan lulusan profesional di bidangnya. Sehubungan dengan hal tersebut, kami memohon kepada Bapak atau Ibu memberikan izin mahasiswa kami dalam melaksanakan magang di instansi yang Bapak/Ibu pimpin. Mahasiswa tersebut adalah sebagai berikut :</p>		
Nama	: Alina Jasmine	
NIM	: 21311561	
Alamat	: Sendowo F141, Sleman, Yogyakarta	
Tempat/Tgl. Lahir	: Sleman, 27 September 2003	
Program Studi	: Manajemen	
Jenjang	: Sarjana	
Periode Magang	: 22 Januari 2024 – 7 Juli 2024	
<p>Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.</p>		
<i>Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh</i>		
Kaprodi Manajemen S1		
		
		
Abdur Rafik, S.E., M.Sc.		
NIK : 133110105		

Lampiran 2. Surat Penerimaan Magang



Nomor : 067/TBGI-HRGA/XII/2023
Lampiran : -
Perihal : Balasan Surat Permohonan Magang

Kepada :
Yth. Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta

Dengan hormat,
Berdasarkan Surat Nomor : 2986/Ka.ProdiMnj/60/Prodi.Mnj/XI/2023 tertanggal 11 Desember 2023, perihal permohonan ijin magang kepada mahasiswa :

Nama : Alina Jasmine
NIM : 21311561
Program Studi : Manajemen

Bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa tersebut di atas dapat kami terima untuk melaksanakan magang di Perusahaan kami terhitung mulai 22 Januari 2024 s/d 07 Juli 2024.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Cikarang, 11 Desember 2023
PT. ThreeBond Garpan Sales Indonesia

PT. THREEBOND GARPAN SALES INDONESIA
CIKARANG

Endy Gunawan
General Manager HRD

PT. ThreeBond Garpan Sales Indonesia

EJIP Industrial Park Plot No. 7J-3 Sukaresmi Cikarang Selatan Kab. Bekasi Jawa Barat 17550 - INDONESIA
Tel. +62-21- 8970411 Fax. +62-21- 8970416

CREATING OUR FUTURE FROM A SINGLE DROP

Lampiran 3. Daftar Hadir Magang

DAFTAR HADIR MAGANG

Bulan/Tahun: Januari/2024

Nama Instansi : PT Threebond Garpan Sales Indonesia

Nama Mahasiswa : ALINA JASMINE - 21311561

Asal Perguruan Tinggi : Prodi Manajemen Universitas Islam Indonesia

No	Tanggal	Lama kerja	Deskripsi Singkat Aktivitas	Paraf Supervisor
1	22 Januari 2024	9 jam	Perkenalan diri, Belajar membuat jurnal menggunakan Excel	
2	23 Januari 2024	9 jam	Melanjutkan pembuatan laporan jurnal, merapikan dokumen,	
3	24 Januari 2024	9 jam	Melanjutkan laporan jurnal, merevisi jurnal	
4	25 Januari 2024	9 jam	Revisi jurnal, membuat jurnal, merapikan dokumen	
5	26 Januari 2024	9 jam	Jurnal PPh 23, Natura	
6	29 Januari 2024	9 jam	Membuat purchase voucher, payable voucher, jurnal	
7	30 Januari 2024	9 jam	Membuat Laporan jurnal, Jurnal pajak pph23, membuat payable voucher	
8	31 Januari 2024	9 jam	Membuat payable voucher, Insentif HAC, Natura	


Alina Jasmine.

 31/24.
Farmila /d

DAFTAR HADIR MAGANG

Bulan/Tahun: Februari/2024

Nama Instansi : PT Threebond Garpan Sales Indonesia

Nama Mahasiswa : ALINA JASMINE - 21311561

Asal Perguruan Tinggi : Prodi Manajemen Universitas Islam Indonesia

TANGGAL		DESKRIPSI	PIC	PARAF
01-Feb-24	1	Memilih Dokumen Import	Dewi	
	2	Expense Report	Dewi	
02-Feb-24	1	Expense Report	Dewi	
	2	Tax 2023	Dewi	
05-Feb-24	1	Tax 2023	Dewi	
	2	Jurnal Payable & Purchase Voucher	Dewi	
06-Feb-24	1	Jurnal Payable & Purchase Voucher	Dewi	
	2	Input Klaim Kendaraan	Sintha	
07-Feb-24	1	Menyusun Invoice & Faktur Pajak	Prasiska	
	2	Jurnal Payable & Purchase Voucher	Dewi	
09-Feb-24				
12-Feb-24	1	Menyusun Invoice & Faktur Pajak	Prasiska	
	2	Jurnal Payable & Purchase Voucher	Dewi	
13-Feb-24	1	Jurnal Payable & Purchase Voucher	Dewi	
	2	Input Klaim Kendaraan	Sintha	
15-Feb-24	1	Menyusun Invoice & Faktur Pajak	Prasiska	
	2	Jurnal Payable & Purchase Voucher	Dewi	
16-Feb-24	1	Jurnal Payable & Purchase Voucher	Dewi	
	2	Arsip Tanda terima Invoice AR	Sintha	
19-Feb-24	1	Jurnal Payable & Purchase Voucher	Dewi	

TANGGAL		DESKRIPSI	PIC	PARAF
19-Feb-24	2	Tax 2023	Dewi	
20-Feb-24	1	Jurnal Payable & Purchase Voucher	Dewi	
	2	Menyusun Invoice & Faktur Pajak	Prasiska	
21-Feb-24	1	Jurnal Payable & Purchase Voucher	Dewi	
	2	Arsip Tanda terima Invoice AR	Sintha	
22-Feb-24	1	Jurnal Payable & Purchase Voucher	Dewi	
	2	Monthly Meeting	Farmila	
23-Feb-24	1	Jurnal Payable & Purchase Voucher	Dewi	
	2	Input Klaim Kendaraan	Sintha	
26-Feb-24	1	Jurnal Payable & Purchase Voucher	Dewi	
	2	Input Klaim Kendaraan	Sintha	
27-Feb-24	1	Jurnal Payable & Purchase Voucher	Dewi	
	2	Input Klaim Kendaraan	Sintha	
28-Feb-24	1	Jurnal Payable & Purchase Voucher	Dewi	
	2	Expense Report	Dewi	
	3	Petty Cash	Sintha	
	4	Input Klaim Kendaraan	Sintha	
29-Feb-24	1	Jurnal Payable & Purchase Voucher	Dewi	
	2	Expense Report	Dewi	
	3	Input Klaim Kendaraan	Sintha	

Cikarang, 4 Maret 2024


Alina Jasmine
 Mahasiswa


Farmila
 General Manager Accounting Finance

DAFTAR HADIR MAGANG

Bulan/Tahun: Maret/2024

Nama Instansi : PT Threebond Garpan Sales Indonesia

Nama Mahasiswa :ALINA JASMINE - 21311561

Asal Perguruan Tinggi : Prodi Manajemen Universitas Islam Indonesia

TANGGAL	JAM		DESKRIPSI	PIC	PARAF
01/03/2024	9 Jam	1	Jurnal Payable & Purchase Voucher	Dewi	
		2	Arsip Tanda terima Invoice AR	Sintha	
04/03/2024	9 Jam	1	Jurnal Payable & Purchase Voucher	Dewi	
		2	Import PV	Dewi	
05/03/2024	9 Jam	1	Jurnal Payable & Purchase Voucher	Dewi	
		2	Arsip Tanda terima Invoice AR	Sintha	
06/03/2024	9 Jam	1	Input Klaim Kendaraan	Sintha	
		2	Tax 2024	Dewi	
		3	Jurnal Payable & Purchase Voucher	Dewi	
07/03/2024	9 Jam	1	Expense Report	Dewi	
		2	Jurnal Payable & Purchase Voucher	Dewi	
		3	Arsip Tanda terima Invoice AR	Sintha	
08/03/2024	9 Jam	1	Arsip Tanda terima Invoice AR	Sintha	
		2	Jurnal Payable & Purchase Voucher	Dewi	
		3	Mendistribusikan Invoice Untuk Tukar Faktur Via Kurir	Prasiska	
12/03/2024	9 Jam	1	Menginput Faktur Pajak	Prasiska	
		2	Jurnal Payable & Purchase Voucher	Dewi	
		3	Arsip Tanda terima Invoice AR	Sintha	

13/03/2024	9 Jam	1	Jurnal Payable & Purchase Voucher	Dewi	
		2	Menyusun Invoice & Faktur pajak	Prasiska	
14/03/2024	9 Jam	1	Jurnal Payable & Purchase Voucher	Dewi	
15/03/2024	9 Jam	1	Input Klaim Kendaraan	Sintha	
		2	Jurnal Payable & Purchase Voucher	Dewi	
18/03/2024	9 Jam	1	Jurnal Payable & Purchase Voucher	Dewi	
		2	Input Klaim Kendaraan	Sintha	
		3	Menyusun Invoice & Faktur pajak	Prasiska	
19/03/2024	9 Jam	1	Jurnal Payable & Purchase Voucher	Dewi	
		2	Monthly Meeting	Farmila	
20/03/2024	9 Jam	1	Arsip Tanda terima Invoice AR	Sintha	
		2	Tax 2024	Dewi	
		3	Jurnal Payable & Purchase Voucher	Dewi	
21/03/2024	9 Jam	1	Menyusun Invoice & Faktur pajak	Prasiska	
		2	Jurnal Payable & Purchase Voucher	Dewi	
		3	Tax 2024	Dewi	
		4	Arsip Tanda terima Invoice AR	Sintha	
22/03/2024	9 Jam	1	Jurnal Payable & Purchase Voucher	Dewi	
		2	Petty Cash	Sintha	
25/03/2024	9 Jam	1	Jurnal Payable & Purchase Voucher	Dewi	
		2	Expense Report	Dewi	
26/03/2024	9 Jam	1	Expense Report	Dewi	
		2	Jurnal Payable & Purchase Voucher	Dewi	
		3	Arsip Tanda terima Invoice AR	Sintha	

27/03/2024	9 Jam	1	Expense Report	Dewi	
		2	Arsip Tanda terima Invoice AR	Sintha	
		3	Menyusun Invoice & Faktur pajak	Prasiska	
		4	Tax 2024	Dewi	
28/03/2024	9 Jam	1	Arsip Tanda terima Invoice AR	Sintha	
		2	Jurnal Payable & Purchase Voucher	Dewi	

Cikarang, Senin 1 April 2024


Alina Jasmine
Mahasiswa


Farnila
General Manager Accounting Finance

Catatan Supervisor:

DAFTAR HADIR MAGANG

Bulan/Tahun: April/2024

Nama Instansi : PT Threebond Garpan Sales Indonesia

Nama Mahasiswa : ALINA JASMINE - 21311561

Asal Perguruan Tinggi : Prodi Manajemen Universitas Islam Indonesia

TANGGAL	JAM		DESKRIPSI	PIC	PARAF
01/04/2024	9 Jam	1	Arsip Tanda terima Invoice AR	Sintha	
		2	Menyusun Invoice & Faktur pajak	Prasiska	
02/04/2024	9 Jam	1	Jurnal Payable & Purchase Voucher	Dewi	
03/04/2024	9 Jam	1	Menginput Faktur Pajak	Prasiska	
		2	Jurnal Payable & Purchase Voucher	Dewi	
04/04/2024	9 Jam	1	Arsip Tanda terima Invoice AR	Sintha	
		2	Jurnal Payable & Purchase Voucher	Dewi	
		3	Input Klaim Kendaraan	Sintha	
16/04/2024	9 Jam	1	Jurnal Payable & Purchase Voucher	Dewi	
		2	Arsip Tanda terima Invoice AR	Sintha	
		3	Input Klaim Kendaraan	Sintha	
17/04/2024	9 Jam	1	Jurnal Payable & Purchase Voucher	Dewi	
18/04/2024	9 Jam	1	Jurnal Payable & Purchase Voucher	Dewi	
		2	Arsip Tanda terima Invoice AR	Sintha	
19/04/2024	9 Jam	1	Jurnal Payable & Purchase Voucher	Dewi	
		2	Input Invoice tanda terima tukar faktur	Prasiska	
22/04/2024	9 Jam	1	Jurnal Payable & Purchase Voucher	Dewi	
		2	Input Klaim Kendaraan	Sintha	
23/04/2024	9 Jam	1	Jurnal Payable & Purchase Voucher	Dewi	
		2	Input Klaim Kendaraan	Sintha	

24/04/2024	9 Jam	1	petty Cash	Sintha	
		2	Jurnal Payable & Purchase Voucher	Dewi	
		3	Input Klaim Kendaraan	Sintha	
25/04/2024	9 Jam	1	petty Cash	Sintha	
		2	Jurnal Payable & Purchase Voucher	Dewi	
		3	Input Klaim Kendaraan	Sintha	
26/04/2024	9 Jam	1	Jurnal Payable & Purchase Voucher	Dewi	
		2	Input Klaim Kendaraan	Sintha	
29/04/2024	9 Jam	1	Entertainment 144 -	Dewi	
		2	Jurnal Payable & Purchase Voucher	Dewi	
		3	Arsip Tanda terima Invoice AR	Sintha	
30/04/2024	9 Jam	1	Arsip Tanda terima Invoice AR	Sintha	
		2	Jurnal Payable & Purchase Voucher	Dewi	

Cikarang, 6 Mei 2024



Alina Jasmine
Mahasiswa



Farmila
General Manager Accounting Finance

DAFTAR HADIR MAGANG

Bulan/Tahun: Mei/2024

Nama Instansi : PT Threebond Garpan Sales Indonesia

Nama Mahasiswa : ALINA JASMINE - 21311561

Asal Perguruan Tinggi : Prodi Manajemen Universitas Islam Indonesia

TANGGAL	Jam	DESKRIPSI	PIC	PARAF
01/05/2024	9 Jam	1 Jurnal Payable & Purchase Voucher	Dewi	
02/05/2024	9 Jam	1 Jurnal Payable & Purchase Voucher	Dewi	
03/05/2024	9 Jam	Sakit		
06/05/2024	9 Jam	1 Jurnal Payable & Purchase Voucher	Dewi	
		2 Arsip Tanda terima Invoice AR	Sintha	
07/05/2024	9 Jam	1 Jurnal Payable & Purchase Voucher	Dewi	
		2 Monthly Meeting	Faniela	
08/05/2024	9 Jam	1 Menginput Faktur Pajak	Prasiska	
		2 Jurnal Payable & Purchase Voucher	Dewi	
10/05/2024	9 Jam	1 Jurnal Payable & Purchase Voucher	Dewi	
		2 Tax 2024	Dewi	
		3 Input Klaim Kendaraan	Sintha	
13/05/2024	9 Jam	1 Input Klaim Kendaraan	Sintha	
		2 Jurnal Payable & Purchase Voucher	Dewi	
14/05/2024	9 Jam	1 Input Klaim Kendaraan	Sintha	
		2 Jurnal Payable & Purchase Voucher	Dewi	
		3 Menyusun Invoice & Faktur pajak	Prasiska	
15/05/2024	9 Jam	1 Menyusun Invoice & Faktur pajak	Prasiska	
		2 Jurnal Payable & Purchase Voucher	Dewi	

16/05/2024	9 Jam	1 Menyusun Invoice & Faktur pajak	Prasiska	
		2 Jurnal Payable & Purchase Voucher	Dewi	
		3 Arsip Tanda terima Invoice AR	Sintha	
17/05/2024	9 Jam	1 Arsip Tanda terima Invoice AR	Sintha	
		2 Jurnal Payable & Purchase Voucher	Dewi	
20/05/2024	9 Jam	1 Jurnal Payable & Purchase Voucher	Dewi	
		2 Tax 2024	Dewi	
21/05/2024	9 Jam	1 Jurnal Payable & Purchase Voucher	Dewi	
		2 Arsip Tanda terima Invoice AR	Sintha	
22/05/2024	9 Jam	1 Jurnal Payable & Purchase Voucher	Dewi	
		2 Menyusun Invoice & Faktur pajak	Prasiska	
		3 Arsip Tanda terima Invoice AR	Sintha	
24/05/2024	9 Jam	1 Jurnal Payable & Purchase Voucher	Dewi	
		2 Menyusun Invoice & Faktur pajak	Prasiska	
27/05/2024	9 Jam	1 Arsip Tanda terima Invoice AR	Sintha	
		2 Jurnal Payable & Purchase Voucher	Dewi	
		3 Entertainment List	Dewi	
28/05/2024	9 Jam	1 Entertainment List	Dewi	
		2 Jurnal Payable & Purchase Voucher	Dewi	
		3 Arsip Tanda terima Invoice AR	Sintha	
29/05/2024	9 Jam	1 Menyusun Invoice & Faktur pajak	Prasiska	
		2 Jurnal Payable & Purchase Voucher	Dewi	
		1 Entertainment List	Dewi	

30/05/2024	9 Jan	2	Jurnal Payable & Purchase Voucher	Dewi	4
		3	Input Klaim Kendaraan	Sintha	5
31/05/2024	9 Jan	1	Entertainment List	Dewi	4
		2	Jurnal Payable & Purchase Voucher	Dewi	4
		3	Input Klaim Kendaraan	Sintha	5



Alina Jasmine
Mahasiswa

Cikarang, 10 Juni 2024



Faniela
General Manager Accounting Finance

DAFTAR HADIR MAGANG

Bulan/Tahun: Juni-July/2024

Nama Instansi : PT Threebond Garpan Sales Indonesia

Nama Mahasiswa : ALINA JASMINE - 21311561

Asal Perguruan Tinggi : Prodi Manajemen Universitas Islam Indonesia

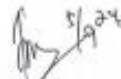
TANGGAL	Jam	DESKRIPSI	PIC	PARAF
03/06/2024	9 Jam	1 Arsip Tanda terima Invoice AR	Sintha	
		2 Input Klaim Kendaraan	Sintha	
		3 Menyusun Invoice & Faktur pajak	Prasiska	
		4 Jurnal Payable & Purchase Voucher	Dewi	
04/06/2024	9 Jam	1 Menyusun Invoice & Faktur pajak	Prasiska	
		2 Arsip Tanda terima Invoice AR	Sintha	
		3 Jurnal Payable & Purchase Voucher	Dewi	
05/06/2024	9 Jam	1 Jurnal Payable & Purchase Voucher	Dewi	
		2 Menyusun Invoice & Faktur pajak	Prasiska	
06/06/2024	9 Jam	1 Jurnal Payable & Purchase Voucher	Dewi	
		2 Menyusun Invoice & Faktur pajak	Prasiska	
07/06/2024	9 Jam	1 Arsip Tanda terima Invoice AR	Sintha	
		2 Jurnal Payable & Purchase Voucher	Dewi	
10/06/2024	9 Jam	1 Jurnal Payable & Purchase Voucher	Dewi	
		2 Menginput Tanda Terima invoice	Prasiska	
11/06/2024	9 Jam	1 Jurnal Payable & Purchase Voucher	Dewi	
12/06/2024	9 Jam	1 Arsip Tanda terima Invoice AR	Sintha	
		2 Jurnal Payable & Purchase Voucher	Dewi	

13/06/2024	9 Jan	1 Jurnal Payable & Purchase Voucher	Dewi	f
14/06/2024	9 Jan	1 Jurnal Payable & Purchase Voucher	Dewi	f
		2 Menginput Ppn In	Pesiska	Se
18/06/2024	9 Jan	1 Jurnal Payable & Purchase Voucher	Dewi	f
		2 Tax 2024	Dewi	f
		3 Arsip Tanda terima Invoice AR	Sintha	Q
19/06/2024	9 Jan	1 Jurnal Payable & Purchase Voucher	Dewi	f
		2 Tax 2024	Dewi	f
20/06/2024	9 Jan	1 Jurnal Payable & Purchase Voucher	Dewi	f
21/06/2024	9 Jan	1 Arsip Tanda terima Invoice AR	Sintha	Q
		2 Jurnal Payable & Purchase Voucher	Dewi	f
24/06/2024	9 Jan	1 Arsip Tanda terima Invoice AR	Sintha	Q
		2 Jurnal Payable & Purchase Voucher	Dewi	f
		3 Input Klaim Kendaraan	Sintha	Q
25/06/2024	9 Jan	1 Input Klaim Kendaraan	Sintha	Q
		2 Jurnal Payable & Purchase Voucher	Dewi	f
		3 Petty Cash	Sintha	Q
26/06/2024	9 Jan	1 Input Klaim Kendaraan	Sintha	Q
		2 Jurnal Payable & Purchase Voucher	Dewi	f
		3 Arsip Tanda terima Invoice AR	Sintha	Q
27/06/2024	9 Jan	1 Input Klaim Kendaraan	Sintha	Q
		2 Jurnal Payable & Purchase Voucher	Dewi	f

		3	Arsip Tanda terima Invoice AR	Sintha	
28/06/2024	9 Jam	1	Jurnal Payable & Purchase Voucher	Dewi	
		2	Entertainment List	Dewi	
01/07/2024	9 Jam	1	Arsip Tanda terima Invoice AR	Sintha	
		2	Entertainment List	Dewi	
		3	Jurnal Payable & Purchase Voucher	Dewi	
		4	Menyusun Invoice & Faktur pajak	Prasiska	
02/07/2024	9 Jam	1	Jurnal Payable & Purchase Voucher	Dewi	
		2	Menyusun Invoice & Faktur pajak	Prasiska	
		3	Menginput Tanda Terima invoice	Prasiska	
03/07/2024	9 Jam	1	Menginput Tanda Terima invoice	Prasiska	
		2	Jurnal Payable & Purchase Voucher	Dewi	
		3	Arsip Tanda terima Invoice AR	Sintha	
		4	Menyusun Invoice & Faktur pajak	Prasiska	
04/07/2024	9 Jam	1	Jurnal Payable & Purchase Voucher	Dewi	
		2	Menginput Ppn In	Prasiska	
05/07/2024	9 Jam	1	Arsip Tanda terima Invoice AR	Sintha	
		2	Menginput Ppn In	Prasiska	


Alina Jasmine
Mahasiswa

Cikarang, Jam'at 5 Juli 2024


Fanni
General Manager Accounting Finans